



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan.....



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- 1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener Meriah ini.



- 2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener Meriah ini.

Pasal 4

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

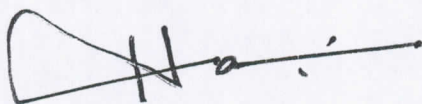
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal : 30 November 2020 M  
15 Rabiul Akhir 1442 H

 BUPATI BENER MERIAH,  
 SARKAWI

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal : 30 November 2020 M  
15 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH, 



HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

| NO   | URAIAN                                                                                      | SATUAN | BESARAN     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1    | 2                                                                                           | 3      | 4           |
| 1.   | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN                                              |        |             |
| 1.1. | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran |        |             |
|      | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta                                                        | OB     | Rp936.000   |
|      | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta                                    | OB     | Rp1.125.000 |
|      | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta                                    | OB     | Rp1.305.000 |
|      | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar                                    | OB     | Rp1.494.000 |
|      | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                                 | OB     | Rp1.773.000 |
|      | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar                                 | OB     | Rp2.052.000 |
|      | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar                                  | OB     | Rp2.331.000 |
|      | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                                 | OB     | Rp2.709.000 |
|      | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                                 | OB     | Rp3.078.000 |
|      | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar                                 | OB     | Rp3.456.000 |
|      | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar                                | OE     | Rp3.825.000 |
|      | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar                                                   | OB     | Rp4.293.000 |
| 1.2. | Pejabat Pembuat Komitmen                                                                    |        |             |
|      | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta                                                        | OB     | Rp800.000   |
|      | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta                                    | OB     | Rp900.000   |
|      | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta                                    | OB     | Rp1.100.000 |
|      | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar                                    | OB     | Rp1.300.000 |
|      | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar                                                     | OB     | Rp1.500.000 |
| 1.3. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                                                    |        |             |
|      | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta                                                        | OB     | Rp250.000   |
|      | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta                                    | OB     | Rp300.000   |
|      | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta                                    | OB     | Rp400.000   |
|      | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar                                    | OB     | Rp500.000   |
|      | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar                                                     | OB     | Rp650.000   |
| 1.4. | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)                     |        |             |
|      | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 250 Juta                                                        | OB     | Rp400.000   |
|      | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta                                    | OB     | Rp550.000   |
|      | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar                                    | OB     | Rp650.000   |
|      | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                                 | OB     | Rp750.000   |
|      | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar                                 | OB     | Rp850.000   |
|      | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar                                  | OB     | Rp950.000   |
|      | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                                 | OB     | Rp1.200.000 |
|      | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                                 | OB     | Rp1.500.000 |
|      | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar                                 | OB     | Rp1.700.000 |
|      | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar                                | OB     | Rp2.000.000 |
|      | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar                                                   | OB     | Rp2.440.000 |
| 1.5. | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan                                             |        |             |
|      | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta                                                        | OB     | Rp300.000   |
|      | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta                                    | OB     | Rp400.000   |
|      | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta                                    | OB     | Rp500.000   |
|      | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar                                    | OB     | Rp550.000   |
|      | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                                 | OB     | Rp600.000   |
|      | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar                                 | OB     | Rp700.000   |
|      | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar                                  | OB     | Rp800.000   |
|      | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                                 | OB     | Rp1.000.000 |



| NO | URAIAN                                                                                                                                         | SATUAN | BESARAN     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                              | 3      | 4           |
|    | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                                                                                    | OB     | Rp1.300.000 |
|    | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar                                                                                    | OB     | Rp1.500.000 |
|    | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar                                                                                   | OB     | Rp1.700.000 |
|    | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar                                                                                                      | OB     | Rp2.000.000 |
|    | 1.6. Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas Pengelola<br>Administrasi Belanja Pegawai |        |             |
|    | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta                                                                                                           | OB     | Rp200.000   |
|    | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta                                                                                       | OB     | Rp300.000   |
|    | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta                                                                                       | OB     | Rp350.000   |
|    | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar                                                                                       | OB     | Rp400.000   |
|    | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                                                                                    | OB     | Rp500.000   |
|    | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar                                                                                    | OB     | Rp550.000   |
|    | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar                                                                                     | OB     | Rp600.000   |
|    | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                                                                                    | OB     | Rp800.000   |
|    | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                                                                                    | OB     | Rp900.000   |
|    | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar                                                                                    | OB     | Rp1.100.000 |
|    | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar                                                                                   | OB     | Rp1.300.000 |
|    | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar                                                                                                      | OB     | Rp1.500.000 |
| 2. | HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA                                                                                                             |        |             |
|    | 2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa                                                                                                | OB     | Rp680.000   |
|    | 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa                                                                                |        |             |
|    | 2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa<br>(Konstruksi)                                                              |        |             |
|    | a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta                                                                                                       | OP     | Rp650.000   |
|    | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta                                                                                 | OP     | Rp800.000   |
|    | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar                                                                                 | OP     | Rp1.000.000 |
|    | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar                                                                                    | OP     | Rp1.250.000 |
|    | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar                                                                                    | OP     | Rp1.500.000 |
|    | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar                                                                                     | OP     | Rp1.750.000 |
|    | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar                                                                                    | OP     | Rp2.100.000 |
|    | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar                                                                                    | OP     | Rp2.400.000 |
|    | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar                                                                                                  | OP     | Rp2.500.000 |
|    | 2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa<br>untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)                                    |        |             |
|    | a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta                                                                                                       | OP     | Rp700.000   |
|    | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta                                                                                 | OP     | Rp750.000   |
|    | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar                                                                                 | OP     | Rp900.000   |
|    | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar                                                                                    | OP     | Rp1.100.000 |
|    | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d 10 miliar                                                                                   | OP     | Rp1.350.000 |
|    | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar                                                                                                   | OP     | Rp1.600.000 |
|    | 2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa                                                                              |        |             |
|    | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp. 50 juta                                                                                       | OP     | Rp450.000   |
|    | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d Rp.<br>100 juta                                                               | OP     | Rp450.000   |
|    | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta                                                                                          | OP     | Rp450.000   |
|    | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.<br>100 juta s.d Rp. 250 juta                                                | OP     | Rp480.000   |
|    | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.<br>250 juta s.d Rp. 500 juta                                                | OP     | Rp600.000   |
|    | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.<br>500 juta s.d Rp. 1 miliar                                                | OP     | Rp720.000   |
|    | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 1<br>miliar s.d Rp. 5 miliar                                                | OP     | Rp910.000   |
|    | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 5<br>miliar                                                                 | OP     | Rp1.090.000 |



| NO | URAIAN                                                                                          | SATUAN | BESARAN     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | 2                                                                                               | 3      | 4           |
|    | 2.3. Honorarium Pengguna Anggaran                                                               |        |             |
|    | 2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)                         |        |             |
|    | a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar                              | OP     | Rp3.580.000 |
|    | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar                              | OP     | Rp4.030.000 |
|    | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar                              | OP     | Rp4.490.000 |
|    | 2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)                            |        |             |
|    | a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar                              | OP     | Rp3.230.000 |
|    | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar                              | OP     | Rp3.640.000 |
|    | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar                              | OP     | Rp4.040.000 |
|    | 2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)                              |        |             |
|    | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | OP     | Rp1.510.000 |
|    | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | OP     | Rp1.750.000 |
|    | c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | OP     | Rp1.990.000 |
| 3. | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)                               |        |             |
|    | 3.1. Kepala                                                                                     | OB     | Rp1.000.000 |
|    | 3.2. Sekretaris/Staf Pendukung                                                                  | OB     | Rp750.000   |
| 4. | HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK (PDBP)                                       |        |             |
|    | 4.1. Atasan Langsung Bendahara                                                                  |        |             |
|    | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                                              | OB     | Rp400.000   |
|    | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 juta                                       | OB     | Rp500.000   |
|    | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta                                       | OB     | Rp600.000   |
|    | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar                                       | OB     | Rp700.000   |
|    | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                                     | OB     | Rp850.000   |
|    | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar                                     | OB     | Rp1.000.000 |
|    | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar                                      | OB     | Rp1.200.000 |
|    | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                                     | OB     | Rp1.500.000 |
|    | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                                     | OB     | Rp1.800.000 |
|    | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar                                     | OB     | Rp2.000.000 |
|    | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar                                                       | OB     | Rp2.300.000 |
|    | 4.2. Bendahara Penerimaan                                                                       |        |             |
|    | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                                              | OB     | Rp300.000   |
|    | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 juta                                       | OB     | Rp400.000   |
|    | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta                                       | OB     | Rp500.000   |
|    | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar                                       | OB     | Rp550.000   |
|    | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                                     | OB     | Rp670.000   |
|    | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar                                     | OB     | Rp750.000   |
|    | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar                                      | OB     | Rp860.000   |
|    | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                                     | OB     | Rp1.090.000 |
|    | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                                     | OB     | Rp1.300.000 |
|    | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar                                     | OB     | Rp1.550.000 |
|    | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar                                    | OB     | Rp1.900.000 |
|    | 4.3. Petugas Penerimaan Daerah Bukan Pajak atau Anggota                                         |        |             |
|    | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                                              | OB     | Rp250.000   |
|    | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 juta                                       | OB     | Rp300.000   |
|    | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta                                       | OB     | Rp350.000   |
|    | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar                                       | OB     | Rp400.000   |
|    | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                                     | OB     | Rp500.000   |
|    | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar                                     | OB     | Rp600.000   |
|    | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar                                      | OB     | Rp750.000   |
|    | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                                     | OB     | Rp900.000   |
|    | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                                     | OB     | Rp1.100.000 |
|    | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar                                     | OB     | Rp1.250.000 |
|    | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar                                    | OB     | Rp1.400.000 |



| NO     | URAIAN                                                                                 | SATUAN                    | BESARAN     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1      | 2                                                                                      | 3                         | 4           |
| 5.     | HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK DAERAH                                    |                           |             |
| 5.1.   | Tingkat Pengguna Barang                                                                | OB                        | Rp400.000   |
| 5.2.   | Tingkat Kuasa Pengguna Barang                                                          | OB                        | Rp300.000   |
| 6.     | HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN                                                  |                           |             |
| 6.1.   | Perekayasa Utama                                                                       | OJ                        | Rp60.000    |
| 6.2.   | Perekayasa Madya                                                                       | OJ                        | Rp50.000    |
| 6.3.   | Perekayasa Muda                                                                        | OJ                        | Rp40.000    |
| 6.4.   | Perekayasa Pertama                                                                     | OJ                        | Rp35.000    |
| 7.     | HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN                                           |                           |             |
| 7.1.   | Pembantu penelitian/perekayasaan                                                       | OJ                        | Rp25.000    |
| 7.2.   | Koordinator penelitian/perekayasaan                                                    | OB                        | Rp420.000   |
| 7.3.   | Sekretariat penelitian/perekayasaan                                                    | OB                        | Rp300.000   |
| 7.4.   | Pengolah data                                                                          | Peneliti/<br>Perekayasaan | Rp1.540.000 |
| 7.5.   | Petugas survei                                                                         | OR                        | Rp8.000     |
| 7.6.   | Pembantu lapangan                                                                      | OH                        | Rp80.000    |
| 8.     | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA                         |                           |             |
| 8.1.   | Honorarium Narasumber/Pembahas                                                         |                           |             |
| a.     | Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | OJ                        | Rp1.400.000 |
| b.     | Pejabat Eselon II/ yang disetarakan                                                    | OJ                        | Rp1.000.000 |
| c.     | Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan                                          | OJ                        | Rp900.000   |
| 8.2.   | Honorarium Moderator                                                                   | OK                        | Rp700.000   |
| 8.3.   | Honorarium Pembawa Acara                                                               | OK                        | Rp400.000   |
| 8.4.   | Honorarium Panitia                                                                     |                           |             |
| a.     | Penanggung Jawab                                                                       | OK                        | Rp450.000   |
| b.     | Ketua/Wakil Ketua                                                                      | OK                        | Rp400.000   |
| c.     | Sekretaris                                                                             | OK                        | Rp300.000   |
| d.     | Anggota                                                                                | OK                        | Rp300.000   |
| 9.     | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN               |                           |             |
| 9.1.   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                                      |                           |             |
| 9.1.1. | Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah                                                     |                           |             |
| a.     | Pengarah                                                                               | OB                        | Rp1.500.000 |
| b.     | Penanggung Jawab                                                                       | OB                        | Rp1.250.000 |
| c.     | Ketua                                                                                  | OB                        | Rp1.000.000 |
| d.     | Wakil Ketua                                                                            | OB                        | Rp850.000   |
| e.     | Sekretaris                                                                             | OB                        | Rp750.000   |
| f.     | Anggota                                                                                | OB                        | Rp750.000   |
| 9.1.2. | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah                                                 |                           |             |
| a.     | Pengarah                                                                               | OB                        | Rp750.000   |
| b.     | Penanggung Jawab                                                                       | OB                        | Rp700.000   |
| c.     | Ketua                                                                                  | OB                        | Rp650.000   |
| d.     | Wakil Ketua                                                                            | OB                        | Rp600.000   |
| e.     | Sekretaris                                                                             | OB                        | Rp500.000   |
| f.     | Anggota                                                                                | OB                        | Rp500.000   |
| 9.2.   | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                          |                           |             |
| 9.2.1. | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah                                                 |                           |             |
| a.     | Ketua/Wakil Ketua                                                                      | OB                        | Rp250.000   |
| b.     | Anggota                                                                                | OB                        | Rp220.000   |
| 10.    | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA/ PENASEHAT HUKUM            |                           |             |
| 10.1   | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli                                          | OK                        | Rp1.800.000 |
| 10.2   | Honorarium Beracara/Penasehat Hukum                                                    | OK                        | Rp1.800.000 |



| NO  | URAIAN                                                                                                | SATUAN           | BESARAN     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                     | 3                | 4           |
| 11. | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL                                                          |                  |             |
|     | 11.1. SLTA                                                                                            | OB               | Rp2.100.000 |
|     | 11.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan                                                                     | OB               | Rp2.400.000 |
|     | 11.3. Sarjana (S1)                                                                                    | OB               | Rp2.600.000 |
|     | 11.4. Master (S2)                                                                                     | OB               | Rp2.800.000 |
|     | 11.5. Doktor (S3)                                                                                     | OB               | Rp3.000.000 |
| 12. | SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH                                                                     |                  |             |
|     | 12.1. Wilayah Kecamatan Nonterpencil                                                                  | OB               | Rp300.000   |
|     | 12.2. Wilayah Kecamatan Terpencil                                                                     | OB               | Rp400.000   |
| 13. | HONORARIUM ROHANIWAN                                                                                  | OK               | Rp400.000   |
| 14. | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/<br>PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE |                  |             |
|     | 14.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal                                                                  |                  |             |
|     | a. Penanggung Jawab                                                                                   | Oter             | Rp500.000   |
|     | b. Redaktur                                                                                           | Oter             | Rp400.000   |
|     | c. Penyunting/Editor                                                                                  | Oter             | Rp300.000   |
|     | d. Desain Grafis                                                                                      | Oter             | Rp180.000   |
|     | e. Fotografer                                                                                         | Oter             | Rp180.000   |
|     | f. Sekretariat                                                                                        | Oter             | Rp150.000   |
|     | g. Pembuat Artikel                                                                                    | Per Halaman      | Rp200.000   |
|     | 14.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah                                                         |                  |             |
|     | a. Penanggung Jawab                                                                                   | Oter             | Rp400.000   |
|     | b. Redaktur                                                                                           | Oter             | Rp300.000   |
|     | c. Penyunting/Editor                                                                                  | Oter             | Rp250.000   |
|     | d. Desain Grafis                                                                                      | Oter             | Rp180.000   |
|     | e. Fotografer                                                                                         | Oter             | Rp180.000   |
|     | f. Sekretariat                                                                                        | Oter             | Rp150.000   |
|     | g. Pembuat Artikel                                                                                    | Per Halaman      | Rp100.000   |
|     | 14.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website                                  |                  |             |
|     | a. Penanggung Jawab                                                                                   | OB               | Rp500.000   |
|     | b. Redaktur                                                                                           | OB               | Rp450.000   |
|     | c. Editor                                                                                             | OB               | Rp400.000   |
|     | d. Web Admin                                                                                          | OB               | Rp350.000   |
|     | e. Web Developer                                                                                      | OB               | Rp300.000   |
|     | f. Pembuat Artikel                                                                                    | Per Halaman      | Rp100.000   |
| 15. | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN                                                                        |                  |             |
|     | 15.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar                                         |                  |             |
|     | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian                                                                  | Naskah/Pelajaran | Rp150.000   |
|     | b. Pengawas Ujian                                                                                     | OH               | Rp240.000   |
|     | c. Pemeriksa Hasil Ujian                                                                              | Siswa/Mata Ujian | Rp5.000     |
|     | 15.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah                                      |                  |             |
|     | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian                                                                  | Naskah/Pelajaran | Rp190.000   |
|     | b. Pengawas Ujian                                                                                     | OH               | Rp270.000   |
|     | c. Pemeriksa Hasil Ujian                                                                              | Siswa/Mata Ujian | Rp7.500     |
| 16. | HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN                                                       |                  |             |
|     | 16.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten                                              | Per Butir Soal   | Rp100.000   |
|     | 16.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten                                                  |                  |             |
|     | a. Telaah Materi Soal                                                                                 | Per Butir Soal   | Rp45.000    |
|     | b. Telaah Bahasa Soal                                                                                 | Per Butir Soal   | Rp20.000    |



| NO  | URAIAN                                                                                                                                  | SATUAN    | BESARAN     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3         | 4           |
| 17. | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)                                                                   |           |             |
|     | 17.1. Honorarium Penceramah                                                                                                             | OJP       | Rp1.000.000 |
|     | 17.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara                                                                     | OJP       | Rp300.000   |
|     | 17.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara                                                                    | OJP       | Rp200.000   |
|     | 17.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat                                                                                                | Per Modul | Rp5.000.000 |
|     | 17.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat                                                                                  |           |             |
|     | a. Lama Diklat s.d. 5 hari :                                                                                                            |           |             |
|     | 1. Penanggun Jawab                                                                                                                      | OK        | Rp450.000   |
|     | 2. Ketua/Wakil Ketua                                                                                                                    | OK        | Rp400.000   |
|     | 3. Sekretaris                                                                                                                           | OK        | Rp300.000   |
|     | 4. Anggota                                                                                                                              | OK        | Rp300.000   |
|     | b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :                                                                                                         |           |             |
|     | 1. Penanggun Jawab                                                                                                                      | OK        | Rp675.000   |
|     | 2. Ketua/Wakil Ketua                                                                                                                    | OK        | Rp600.000   |
|     | 3. Sekretaris                                                                                                                           | OK        | Rp450.000   |
|     | 4. Anggota                                                                                                                              | OK        | Rp450.000   |
|     | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :                                                                                                     |           |             |
|     | 1. Penanggun Jawab                                                                                                                      | OK        | Rp900.000   |
|     | 2. Ketua/Wakil Ketua                                                                                                                    | OK        | Rp800.000   |
|     | 3. Sekretaris                                                                                                                           | OK        | Rp600.000   |
|     | 4. Anggota                                                                                                                              | OK        | Rp600.000   |
| 18. | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN                                                                                            |           |             |
|     | 18.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten                                                                                      |           |             |
|     | a. Pembina                                                                                                                              | OB        | Rp3.500.000 |
|     | b. Pengarah                                                                                                                             | OB        | Rp3.000.000 |
|     | c. Ketua                                                                                                                                | OB        | Rp2.500.000 |
|     | d. Wakil Ketua                                                                                                                          | OB        | Rp2.000.000 |
|     | e. Sekretaris                                                                                                                           | OB        | Rp1.500.000 |
|     | f. Anggota                                                                                                                              | OB        | Rp1.300.000 |
|     | 18.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten                                                                          |           |             |
|     | a. Ketua                                                                                                                                | OB        | Rp1.000.000 |
|     | b. Sekretaris                                                                                                                           | OB        | Rp900.000   |
|     | c. Anggota                                                                                                                              | OB        | Rp600.000   |
| 19. | SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)                                                                                     |           |             |
|     | 19.1. Golongan I, II dan Non ASN                                                                                                        | OH        | Rp35.000    |
|     | 19.2. Golongan III                                                                                                                      | OH        | Rp37.000    |
|     | 19.3. Golongan IV                                                                                                                       | OH        | Rp41.000    |
| 20. | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA                                                       |           |             |
|     | 20.1. Uang Lembur                                                                                                                       |           |             |
|     | a. Golongan I                                                                                                                           | OJ        | Rp13.000    |
|     | b. Golongan II                                                                                                                          | OJ        | Rp17.000    |
|     | c. Golongan III                                                                                                                         | OJ        | Rp20.000    |
|     | d. Golongan IV                                                                                                                          | OJ        | Rp25.000    |
|     | 20.2. Uang Makan Lembur                                                                                                                 |           |             |
|     | a. Golongan I dan II                                                                                                                    | OH        | Rp35.000    |
|     | b. Golongan III                                                                                                                         | OH        | Rp37.000    |
|     | c. Golongan IV                                                                                                                          | OH        | Rp41.000    |
| 21. | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, SOPIR, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI |           |             |
|     | 21.1. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara                                                                                                 |           |             |
|     | a. Uang Lembur                                                                                                                          | OJ        | Rp20.000    |
|     | b. Uang Makan Lembur                                                                                                                    | OH        | Rp31.000    |
|     | 21.2. Satpam, Sopir, Petugas Kebersihan dan Pramubakti                                                                                  |           |             |
|     | a. Uang Lembur                                                                                                                          | OJ        | Rp13.000    |
|     | b. Uang Makan Lembur                                                                                                                    | OH        | Rp30.000    |



| NO  | URAIAN                                                                                                        | SATUAN | BESARAN       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                             | 3      | 4             |
| 22. | BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI                                                                               |        |               |
|     | 22.1. Pejabat Setingkat Eselon II/ yang setara                                                                | OB     | Rp400.000     |
|     | 22.2. Pejabat Setingkat Eselon III/ yang setara ke bawah                                                      | OB     | Rp200.000     |
| 23. | HONORARIUM SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI, JASA SOPIR PADA SKPK                                    |        |               |
|     | 23.1. Satpam                                                                                                  | OB     | Rp1.500.000   |
|     | 23.2. Petugas Kebersihan dan Pramubakti                                                                       | OB     | Rp1.500.000   |
|     | 23.3. Jasa Sopir pada SKPK                                                                                    | OB     | Rp1.000.000   |
| 24. | KELOMPOK HONORARIUM TENAGA KONTRAK/PELAKSANA DAN NAMA LAINNYA UNTUK NON PNS                                   |        |               |
|     | a. Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil dibayarkan berdasarkan Perjanjian Kerja pada SKPK masing - masing. | OB     | Rp2.000.000   |
|     | b. Dokter Umum/Dokter Gigi/ setara                                                                            | OB     | Rp2.000.000   |
|     | c. Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati                                                                            | OB     | Rp2.500.000   |
|     | d. ADC. Bupati/Wakil Bupati                                                                                   | OB     | Rp2.000.000   |
|     | e. ADC. Sekretaris Daerah                                                                                     | OB     | Rp2.000.000   |
|     | f. Dokter Pribadi Bupati/Wakil Bupati                                                                         | OB     | Rp2.500.000   |
|     | g. Jasa Sopir Bupati/Wakil Bupati                                                                             | OB     | Rp2.600.000   |
|     | h. Jasa Sopir Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah                                                             | OB     | Rp2.500.000   |
|     | i. Jasa Sopir Asisten/BPKPA/BAPPEDA                                                                           | OB     | Rp1.500.000   |
|     | j. Jasa Sopir Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati/Isteri Ketua DPRK/Isteri Sekda                                | OB     | Rp1.500.000   |
|     | k. Pengamanan tertutup/melekat Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK                                                 | OB     | Rp1.500.000   |
|     | l. Voorijder Bupati/Wakil Bupati                                                                              | OK     | Rp1.500.000   |
|     | m. Petugas Razia Satpol PP/WH                                                                                 | OK     | Rp132.000     |
| 25. | PAKET PERLENGKAPAN PERALATAN PELATIHAN PER PESERTA                                                            |        |               |
|     | 25.1. Perlengkapan Pelatihan Peserta                                                                          | 1 Pack | Rp145.000     |
|     | Keterangan:                                                                                                   |        |               |
|     | - Terdiri dari Badge, Writing Pad, Balpoin (termasuk (PPn)                                                    |        |               |
| 26. | HONORARIUM JASA PELATIH                                                                                       |        |               |
|     | 26.1. Paskibraka                                                                                              |        |               |
|     | a. Koordinator                                                                                                | Paket  | Rp3.500.000   |
|     | b. Pelatih                                                                                                    | Paket  | Rp3.000.000   |
|     | c. Asisten Pelatih                                                                                            | Paket  | Rp1.750.000   |
|     | d. Peserta                                                                                                    | Paket  | Rp1.500.000   |
|     | 26.2. Pelatih Olah Raga                                                                                       |        |               |
|     | a. Pelatih Internasional                                                                                      | OB     | Rp25.000.000  |
|     | b. Pelatih Nasional                                                                                           | OB     | Rp15.000.000  |
|     | c. Pelatih Daerah                                                                                             | OB     | Rp5.000.000   |
|     | d. Asisten Pelatih                                                                                            | OB     | Rp2.500.000   |
|     | e. Instruktur                                                                                                 | OB     | Rp2.000.000   |
|     | f. Konsultan Pelatih                                                                                          | OB     | Rp10.000.000  |
|     | g. Uang Saku Atlet                                                                                            | OB     | Rp3.000.000   |
| 27. | BONUS ATLET                                                                                                   |        |               |
|     | 27.1. PON                                                                                                     |        |               |
|     | a. Emas Perorangan                                                                                            | Paket  | Rp200.000.000 |
|     | b. Perak Perorangan                                                                                           | Paket  | Rp75.000.000  |
|     | c. Perunggu Perorangan                                                                                        | Paket  | Rp25.000.000  |
|     | d. Emas Beregu                                                                                                | Paket  | Rp300.000.000 |
|     | e. Perak Beregu                                                                                               | Paket  | Rp200.000.000 |
|     | f. Perunggu Beregu                                                                                            | Paket  | Rp100.000.000 |
|     | 27.2. PORWIL/ PRAPON                                                                                          |        |               |
|     | a. Emas Perorangan                                                                                            | Paket  | Rp10.000.000  |
|     | b. Perak Perorangan                                                                                           | Paket  | Rp7.500.000   |
|     | c. Perunggu Perorangan                                                                                        | Paket  | Rp5.000.000   |
|     | d. Emas Beregu                                                                                                | Paket  | Rp25.000.000  |
|     | e. Perak Beregu                                                                                               | Paket  | Rp15.000.000  |
|     | f. Perunggu Beregu                                                                                            | Paket  | Rp5.000.000   |



| NO | URAIAN                                                                                                                        | SATUAN | BESARAN      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                             | 3      | 4            |
|    | 27.3. KEJURNAS                                                                                                                |        |              |
|    | a. Emas Perorangan                                                                                                            | Paket  | Rp10.000.000 |
|    | b. Perak Perorangan                                                                                                           | Paket  | Rp7.500.000  |
|    | c. Perunggu Perorangan                                                                                                        | Paket  | Rp5.000.000  |
|    | d. Emas Beregu                                                                                                                | Paket  | Rp15.000.000 |
|    | e. Perak Beregu                                                                                                               | Paket  | Rp7.500.000  |
|    | f. Perunggu Beregu                                                                                                            | Paket  | Rp5.000.000  |
|    | 27.4. POPNAS/POPWIL/KEJURNAS PELAJAR/POMNAS/POMWIL/<br>KEJURNAS MAHASISWA /PARALYMPIC GAMES/KEJUARAAN OLAH<br>RAGA MASYARAKAT |        |              |
|    | a. Emas Perorangan                                                                                                            | Paket  | Rp5.000.000  |
|    | b. Perak Perorangan                                                                                                           | Paket  | Rp3.000.000  |
|    | c. Perunggu Perorangan                                                                                                        | Paket  | Rp1.500.000  |
|    | d. Emas Beregu                                                                                                                | Paket  | Rp10.000.000 |
|    | e. Perak Beregu                                                                                                               | Paket  | Rp7.500.000  |
|    | f. Perunggu Beregu                                                                                                            | Paket  | Rp5.000.000  |



28. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

28.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

| NO | PROVINSI            | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM | DIKLAT    |
|----|---------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| 1  | 2                   | 3      | 4         | 5                                           | 6         |
| 1  | Aceh                | OH     | Rp360.000 | Rp140.000                                   | Rp110.000 |
| 2  | Sumatera Utara      | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 3  | Riau                | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 4  | Kepulauan Riau      | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 5  | Jambi               | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 6  | Sumatera Barat      | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 7  | Sumatera Selatan    | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 8  | Lampung             | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 9  | Bengkulu            | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 10 | Bangka Belitung     | OH     | Rp410.000 | Rp160.000                                   | Rp120.000 |
| 11 | Banten              | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 12 | Jawa Barat          | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta      | OH     | Rp530.000 | Rp210.000                                   | Rp160.000 |
| 14 | Jawa Tengah         | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta     | OH     | Rp420.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 16 | Jawa Timur          | OH     | Rp410.000 | Rp160.000                                   | Rp120.000 |
| 17 | Bali                | OH     | Rp480.000 | Rp190.000                                   | Rp140.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH     | Rp440.000 | Rp180.000                                   | Rp130.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 20 | Kalimantan Barat    | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah   | OH     | Rp360.000 | Rp140.000                                   | Rp110.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan  | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 23 | Kalimantan Timur    | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 24 | Kalimantan Utara    | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 25 | Sulawesi Utara      | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 26 | Gorontalo           | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 27 | Sulawesi Barat      | OH     | Rp410.000 | Rp160.000                                   | Rp120.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan    | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah     | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 31 | Maluku              | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 32 | Maluku Utara        | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 33 | Papua               | OH     | Rp580.000 | Rp230.000                                   | Rp170.000 |
| 34 | Papua Barat         | OH     | Rp480.000 | Rp190.000                                   | Rp140.000 |

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

| NO | URAIAN            | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM |
|----|-------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3      | 4         | 5                                           |
| 1  | PEJABAT DAERAH    | OH     | Rp250.000 | Rp125.000                                   |
| 2  | PEJABAT ESELON II | OH     | Rp150.000 | Rp75.000                                    |



29. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

| NO. | NEGARA                 | SATUAN | GOLONGAN |     |     |     |
|-----|------------------------|--------|----------|-----|-----|-----|
|     |                        |        | A        | B   | C   | D   |
| 1   | 2                      |        | 3        | 4   | 5   | 6   |
|     | AMERIKA UTARA          |        |          |     |     |     |
| 1   | Amerika Serikat        | OH     | 659      | 563 | 505 | 447 |
| 2   | Kanada                 | OH     | 552      | 467 | 416 | 365 |
|     | AMERIKA SELATAN        |        |          |     |     |     |
| 3   | Argentina              | OH     | 534      | 402 | 351 | 349 |
| 4   | Venezuela              | OH     | 557      | 388 | 344 | 343 |
| 5   | Brazil                 | OH     | 436      | 396 | 378 | 351 |
| 6   | Chile                  | OH     | 434      | 370 | 332 | 294 |
| 7   | Columbia               | OH     | 466      | 413 | 405 | 365 |
| 8   | Peru                   | OH     | 459      | 352 | 320 | 280 |
| 9   | Suriname               | OH     | 398      | 364 | 268 | 268 |
| 10  | Ekuador                | OH     | 416      | 355 | 319 | 283 |
|     | AMERIKA TENGAH         |        |          |     |     |     |
| 11  | Meksiko                | OH     | 553      | 468 | 417 | 366 |
| 12  | Kuba                   | OH     | 453      | 385 | 345 | 305 |
| 13  | Panama                 | OH     | 418      | 357 | 320 | 283 |
|     | EROPA BARAT            |        |          |     |     |     |
| 14  | Asutria                | OH     | 504      | 453 | 347 | 317 |
| 15  | Belgia                 | OH     | 538      | 456 | 406 | 357 |
| 16  | Perancis               | OH     | 548      | 464 | 413 | 381 |
| 17  | Jerman                 | OH     | 485      | 415 | 368 | 324 |
| 18  | Belanda                | OH     | 485      | 416 | 368 | 324 |
| 19  | Swiss                  | OH     | 636      | 570 | 444 | 401 |
|     | EROPA UTARA            |        |          |     |     |     |
| 20  | Denmark                | OH     | 569      | 491 | 428 | 375 |
| 21  | Finlandia              | OH     | 521      | 442 | 394 | 346 |
| 22  | Norwegia               | OH     | 621      | 559 | 389 | 386 |
| 23  | Swedia                 | OH     | 615      | 519 | 461 | 403 |
| 24  | Inggris                | OH     | 792      | 774 | 583 | 582 |
|     | EROPA SELATAN          |        |          |     |     |     |
| 25  | Bosnia dan Herzegovina | OH     | 456      | 420 | 334 | 333 |
| 26  | Kroasia                | OH     | 555      | 506 | 406 | 405 |
| 27  | Spanyol                | OH     | 457      | 413 | 335 | 296 |
| 28  | Yunani                 | OH     | 427      | 379 | 327 | 289 |
| 29  | Italia                 | OH     | 702      | 637 | 446 | 427 |
| 30  | Portugal               | OH     | 425      | 382 | 308 | 273 |
| 31  | Serbia                 | OH     | 417      | 375 | 326 | 288 |
|     | EROPA TIMUR            |        |          |     |     |     |
| 32  | Bulgaria               | OH     | 406      | 367 | 320 | 284 |
| 33  | Ceko                   | OH     | 618      | 526 | 447 | 367 |
| 34  | Hongaria               | OH     | 485      | 438 | 390 | 345 |
| 35  | Polandia               | OH     | 478      | 415 | 363 | 320 |
| 36  | Rumania                | OH     | 416      | 381 | 313 | 277 |
| 37  | Rusia                  | OH     | 556      | 512 | 407 | 406 |
| 38  | Slovakia               | OH     | 437      | 394 | 341 | 303 |
| 39  | Ukraina                | OH     | 485      | 436 | 375 | 331 |
|     | AFRIKA BARAT           |        |          |     |     |     |
| 40  | Nigeria                | OH     | 427      | 422 | 402 | 340 |
| 41  | Senegal                | OH     | 420      | 359 | 322 | 285 |
|     | AFRIKA TIMUR           |        |          |     |     |     |
| 42  | Ethiopia               | OH     | 373      | 320 | 288 | 256 |
| 43  | Kenya                  | OH     | 408      | 358 | 293 | 274 |
| 44  | Madagaskar             | OH     | 356      | 306 | 276 | 246 |
| 45  | Tanzania               | OH     | 388      | 332 | 299 | 266 |
| 46  | Zimbabwe               | OH     | 371      | 319 | 287 | 255 |
| 47  | Mozambik               | OH     | 399      | 329 | 265 | 264 |



|    |                          |    |     |     |     |     |
|----|--------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
|    | AFRIKA SELATAN           |    |     |     |     |     |
| 48 | Namibia                  | OH | 405 | 334 | 268 | 251 |
| 49 | Afrika Selatan           | OH | 427 | 374 | 317 | 294 |
|    | AFRIKA UTARA             |    |     |     |     |     |
| 50 | Aljazair                 | OH | 383 | 328 | 295 | 286 |
| 51 | Mesir                    | OH | 471 | 400 | 358 | 316 |
| 52 | Maroko                   | OH | 377 | 323 | 291 | 259 |
| 53 | Tunisia                  | OH | 293 | 247 | 225 | 203 |
| 54 | Sudan                    | OH | 383 | 328 | 295 | 262 |
| 55 | Libya                    | OH | 308 | 254 | 189 | 165 |
|    | ASIA BARAT               |    |     |     |     |     |
| 56 | Azerbaijan               | OH | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 57 | Bahrain                  | OH | 475 | 424 | 284 | 217 |
| 58 | Irak                     | OH | 461 | 392 | 351 | 310 |
| 59 | Yordania                 | OH | 504 | 428 | 382 | 336 |
| 60 | Kuwait                   | OH | 581 | 491 | 437 | 383 |
| 61 | Libanon                  | OH | 457 | 389 | 348 | 307 |
| 62 | Qatar                    | OH | 506 | 448 | 349 | 290 |
| 63 | Suriah                   | OH | 358 | 301 | 272 | 243 |
| 64 | Turki                    | OH | 456 | 364 | 311 | 276 |
| 65 | Uni Emirat Arab          | OH | 594 | 502 | 446 | 391 |
| 66 | Yaman                    | OH | 353 | 249 | 226 | 204 |
| 67 | Saudia Arabia            | OH | 468 | 398 | 356 | 314 |
| 68 | Kesultanan Oman          | OH | 516 | 437 | 390 | 343 |
|    | ASIA TIMUR               |    |     |     |     |     |
| 69 | Republik Rakyat Tiongkok | OH | 411 | 351 | 315 | 279 |
| 70 | Hongkong                 | OH | 601 | 507 | 451 | 395 |
| 71 | Jepang                   | OH | 519 | 428 | 382 | 339 |
| 72 | Korea Selatan            | OH | 515 | 467 | 425 | 421 |
| 73 | Korea Utara              | OH | 494 | 321 | 300 | 278 |
|    | ASIA SELATAN             |    |     |     |     |     |
| 74 | Afganistan               | OH | 385 | 262 | 238 | 214 |
| 75 | Bangladesh               | OH | 339 | 313 | 243 | 238 |
| 76 | India                    | OH | 422 | 329 | 327 | 325 |
| 77 | Pakistan                 | OH | 343 | 277 | 251 | 225 |
| 78 | Srilanka                 | OH | 388 | 332 | 299 | 266 |
| 79 | Iran                     | OH | 421 | 332 | 299 | 266 |
|    | ASIA TENGAH              |    |     |     |     |     |
| 80 | Uzbekistan               | OH | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81 | Kazakhstan               | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
|    | ASIA TENGGARA            |    |     |     |     |     |
| 82 | Filipina                 | OH | 412 | 367 | 266 | 226 |
| 83 | Singapura                | OH | 615 | 519 | 461 | 403 |
| 84 | Malaysia                 | OH | 394 | 304 | 274 | 244 |
| 85 | Thailand                 | OH | 392 | 330 | 297 | 264 |
| 86 | Myanmar                  | OH | 368 | 250 | 210 | 196 |
| 87 | Laos                     | OH | 380 | 277 | 251 | 225 |
| 88 | Vietnam                  | OH | 383 | 292 | 244 | 219 |
| 89 | Brunei Darussalam        | OH | 374 | 278 | 252 | 226 |
| 90 | Kamboja                  | OH | 296 | 223 | 201 | 196 |
| 91 | Timor Leste              | OH | 392 | 354 | 236 | 212 |
|    | ASIA PASIFIK             |    |     |     |     |     |
| 92 | Asutralia                | OH | 636 | 585 | 424 | 393 |
| 93 | Selandia Baru            | OH | 545 | 461 | 411 | 361 |
| 94 | Koledonia Baru           | OH | 425 | 387 | 299 | 266 |
| 95 | Papua Nugini             | OH | 520 | 476 | 429 | 376 |
| 96 | Fiji                     | OH | 427 | 365 | 327 | 289 |



30. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI            | SATUAN | TARIF HOTEL                |                                  |                                  |                                           |
|----|---------------------|--------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                     |        | KEPALA DAERAH / KETUA DPRK | ANGGOTA DPRK / PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III / II / I |
| 1  | 2                   | 3      | 4                          | 5                                | 6                                | 7                                         |
| 1  | ACEH                | OH     | Rp4.420.000                | Rp3.526.000                      | Rp1.294.000                      | Rp556.000                                 |
| 2  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp4.960.000                | Rp1.518.000                      | Rp1.100.000                      | Rp530.000                                 |
| 3  | RIAU                | OH     | Rp3.820.000                | Rp3.119.000                      | Rp1.650.000                      | Rp852.000                                 |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp4.275.000                | Rp1.854.000                      | Rp1.037.000                      | Rp792.000                                 |
| 5  | JAMBI               | OH     | Rp4.000.000                | Rp3.337.000                      | Rp1.212.000                      | Rp580.000                                 |
| 6  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp5.236.000                | Rp3.332.000                      | Rp1.353.000                      | Rp650.000                                 |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp5.850.000                | Rp3.083.000                      | Rp1.571.000                      | Rp861.000                                 |
| 8  | LAMPUNG             | OH     | Rp4.491.000                | Rp2.067.000                      | Rp1.140.000                      | Rp580.000                                 |
| 9  | BENGKULU            | OH     | Rp2.071.000                | Rp1.628.000                      | Rp1.546.000                      | Rp630.000                                 |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp3.827.000                | Rp2.838.000                      | Rp1.957.000                      | Rp622.000                                 |
| 11 | BANTEN              | OH     | Rp5.725.000                | Rp2.373.000                      | Rp1.000.000                      | Rp718.000                                 |
| 12 | JAWA BARAT          | OH     | Rp5.381.000                | Rp2.755.000                      | Rp1.006.000                      | Rp570.000                                 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp5.850.000                | Rp1.490.000                      | Rp992.000                        | Rp730.000                                 |
| 14 | JAWA TENGAH         | OH     | Rp4.242.000                | Rp1.480.000                      | Rp954.000                        | Rp600.000                                 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp5.017.000                | Rp2.695.000                      | Rp1.384.000                      | Rp845.000                                 |
| 16 | JAWA TIMUR          | OH     | Rp4.400.000                | Rp1.605.000                      | Rp1.076.000                      | Rp664.000                                 |
| 17 | BALI                | OH     | Rp4.890.000                | Rp1.946.000                      | Rp990.000                        | Rp910.000                                 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp3.500.000                | Rp2.648.000                      | Rp1.418.000                      | Rp580.000                                 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp3.000.000                | Rp1.493.000                      | Rp1.355.000                      | Rp550.000                                 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp2.654.000                | Rp1.538.000                      | Rp1.125.000                      | Rp538.000                                 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp4.901.000                | Rp3.391.000                      | Rp1.160.000                      | Rp659.000                                 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp4.797.000                | Rp3.316.000                      | Rp1.500.000                      | Rp540.000                                 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp4.000.000                | Rp2.188.000                      | Rp1.507.000                      | Rp804.000                                 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp4.000.000                | Rp2.188.000                      | Rp1.507.000                      | Rp804.000                                 |
| 25 | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp4.919.000                | Rp2.290.000                      | Rp924.000                        | Rp782.000                                 |
| 26 | GORONTALO           | OH     | Rp4.168.000                | Rp2.549.000                      | Rp1.431.000                      | Rp764.000                                 |
| 27 | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp4.076.000                | Rp2.581.000                      | Rp1.075.000                      | Rp704.000                                 |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp4.820.000                | Rp1.550.000                      | Rp1.020.000                      | Rp732.000                                 |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp2.309.000                | Rp2.027.000                      | Rp1.567.000                      | Rp951.000                                 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp2.475.000                | Rp2.059.000                      | Rp1.297.000                      | Rp786.000                                 |
| 31 | MALUKU              | OH     | Rp3.467.000                | Rp3.240.000                      | Rp1.048.000                      | Rp667.000                                 |
| 32 | MALUKU UTARA        | OH     | Rp3.440.000                | Rp3.175.000                      | Rp1.073.000                      | Rp600.000                                 |
| 33 | PAPUA               | OH     | Rp3.859.000                | Rp3.318.000                      | Rp2.521.000                      | Rp829.000                                 |
| 34 | PAPUA BARAT         | OH     | Rp3.872.000                | Rp3.212.000                      | Rp2.056.000                      | Rp718.000                                 |



31. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

31.1 Setingkat Kepala Daerah

| NO | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY   | FULLDAY   | FULLBOARD   | RESIDENCE |
|----|---------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|    |                     | 3      | 4         | 5         | 6           | 7         |
| 1  | Aceh                | OP     | Rp346.000 | Rp403.000 | Rp1.075.000 | Rp749.000 |
| 2  | Sumatera Utara      | OP     | Rp276.000 | Rp365.000 | Rp800.000   | Rp641.000 |
| 3  | Riau                | OP     | Rp225.000 | Rp335.000 | Rp690.000   | Rp560.000 |
| 4  | Kepulauan Riau      | OP     | Rp230.000 | Rp360.000 | Rp790.000   | Rp590.000 |
| 5  | Jambi               | OP     | Rp271.000 | Rp364.000 | Rp1.008.000 | Rp635.000 |
| 6  | Sumatera Barat      | OP     | Rp245.000 | Rp310.000 | Rp987.000   | Rp555.000 |
| 7  | Sumatera Selatan    | OP     | Rp268.000 | Rp384.000 | Rp860.000   | Rp652.000 |
| 8  | Lampung             | OP     | Rp261.000 | Rp373.000 | Rp836.000   | Rp634.000 |
| 9  | Bengkulu            | OP     | Rp250.000 | Rp373.000 | Rp973.000   | Rp623.000 |
| 10 | Bangka Belitung     | OP     | Rp305.000 | Rp400.000 | Rp925.000   | Rp705.000 |
| 11 | Banten              | OP     | Rp395.000 | Rp468.000 | Rp919.000   | Rp863.000 |
| 12 | Jawa Barat          | OP     | Rp426.000 | Rp530.000 | Rp1.110.000 | Rp956.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta      | OP     | Rp433.000 | Rp510.000 | Rp1.216.000 | Rp943.000 |
| 14 | Jawa Tengah         | OP     | Rp232.000 | Rp309.000 | Rp749.000   | Rp541.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta     | OP     | Rp250.000 | Rp405.000 | Rp963.000   | Rp655.000 |
| 16 | Jawa Timur          | OP     | Rp357.000 | Rp406.000 | Rp1.784.000 | Rp763.000 |
| 17 | Bali                | OP     | Rp375.000 | Rp490.000 | Rp1.500.000 | Rp865.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OP     | Rp368.000 | Rp530.000 | Rp1.001.000 | Rp898.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OP     | Rp308.000 | Rp388.000 | Rp1.088.000 | Rp696.000 |
| 20 | Kalimantan Barat    | OP     | Rp337.000 | Rp400.000 | Rp810.000   | Rp737.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah   | OP     | Rp317.000 | Rp487.000 | Rp1.267.000 | Rp804.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan  | OP     | Rp264.000 | Rp360.000 | Rp930.000   | Rp624.000 |
| 23 | Kalimantan Timur    | OP     | Rp274.000 | Rp365.000 | Rp863.000   | Rp639.000 |
| 24 | Kalimantan Utara    | OP     | Rp274.000 | Rp350.000 | Rp848.000   | Rp624.000 |
| 25 | Sulawesi Utara      | OP     | Rp273.000 | Rp350.000 | Rp870.000   | Rp623.000 |
| 26 | Gorontalo           | OP     | Rp215.000 | Rp393.000 | Rp1.338.000 | Rp608.000 |
| 27 | Sulawesi Barat      | OP     | Rp264.000 | Rp382.000 | Rp856.000   | Rp646.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan    | OP     | Rp290.000 | Rp410.000 | Rp1.574.000 | Rp700.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah     | OP     | Rp283.000 | Rp389.000 | Rp1.013.000 | Rp672.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | OP     | Rp237.000 | Rp350.000 | Rp800.000   | Rp587.000 |
| 31 | Maluku              | OP     | Rp306.000 | Rp454.000 | Rp1.300.000 | Rp760.000 |
| 32 | Maluku Utara        | OP     | Rp316.000 | Rp498.000 | Rp850.000   | Rp814.000 |
| 33 | Papua               | OP     | Rp318.000 | Rp536.000 | Rp1.863.000 | Rp854.000 |
| 34 | Papua Barat         | OP     | Rp292.000 | Rp526.000 | Rp1.752.000 | Rp818.000 |



31.2 Setingkat Eselon II

| NO | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY   | FULLDAY   | FULLBOARD   | RESIDENCE |
|----|---------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1  | 2                   | 3      | 4         | 5         | 6           | 7         |
| 1  | Aceh                | OP     | Rp300.000 | Rp330.000 | Rp772.000   | Rp630.000 |
| 2  | Sumatera Utara      | OP     | Rp178.000 | Rp275.000 | Rp746.000   | Rp453.000 |
| 3  | Riau                | OP     | Rp185.000 | Rp245.000 | Rp591.000   | Rp430.000 |
| 4  | Kepulauan Riau      | OP     | Rp227.000 | Rp273.000 | Rp625.000   | Rp500.000 |
| 5  | Jambi               | OP     | Rp215.000 | Rp301.000 | Rp840.000   | Rp516.000 |
| 6  | Sumatera Barat      | OP     | Rp173.000 | Rp240.000 | Rp663.000   | Rp413.000 |
| 7  | Sumatera Selatan    | OP     | Rp218.000 | Rp293.000 | Rp745.000   | Rp511.000 |
| 8  | Lampung             | OP     | Rp216.000 | Rp270.000 | Rp640.000   | Rp486.000 |
| 9  | Bengkulu            | OP     | Rp214.000 | Rp284.000 | Rp912.000   | Rp498.000 |
| 10 | Bangka Belitung     | OP     | Rp299.000 | Rp385.000 | Rp804.000   | Rp684.000 |
| 11 | Banten              | OP     | Rp275.000 | Rp354.000 | Rp837.000   | Rp629.000 |
| 12 | Jawa Barat          | OP     | Rp331.000 | Rp398.000 | Rp822.000   | Rp729.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta      | OP     | Rp354.000 | Rp433.000 | Rp1.197.000 | Rp787.000 |
| 14 | Jawa Tengah         | OP     | Rp191.000 | Rp263.000 | Rp675.000   | Rp454.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta     | OP     | Rp210.000 | Rp310.000 | Rp750.000   | Rp520.000 |
| 16 | Jawa Timur          | OP     | Rp338.000 | Rp395.000 | Rp1.352.000 | Rp733.000 |
| 17 | Bali                | OP     | Rp330.000 | Rp441.000 | Rp1.182.000 | Rp771.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OP     | Rp280.000 | Rp420.000 | Rp764.000   | Rp700.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OP     | Rp271.000 | Rp377.000 | Rp825.000   | Rp648.000 |
| 20 | Kalimantan Barat    | OP     | Rp250.000 | Rp331.000 | Rp664.000   | Rp581.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah   | OP     | Rp242.000 | Rp340.000 | Rp1.031.000 | Rp582.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan  | OP     | Rp194.000 | Rp295.000 | Rp734.000   | Rp489.000 |
| 23 | Kalimantan Timur    | OP     | Rp207.000 | Rp302.000 | Rp750.000   | Rp509.000 |
| 24 | Kalimantan Utara    | OP     | Rp207.000 | Rp302.000 | Rp750.000   | Rp509.000 |
| 25 | Sulawesi Utara      | OP     | Rp185.000 | Rp270.000 | Rp737.000   | Rp455.000 |
| 26 | Gorontalo           | OP     | Rp175.000 | Rp250.000 | Rp1.299.000 | Rp425.000 |
| 27 | Sulawesi Barat      | OP     | Rp235.000 | Rp323.000 | Rp792.000   | Rp558.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan    | OP     | Rp206.000 | Rp320.000 | Rp1.127.000 | Rp526.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah     | OP     | Rp234.000 | Rp385.000 | Rp738.000   | Rp619.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | OP     | Rp195.000 | Rp295.000 | Rp688.000   | Rp490.000 |
| 31 | Maluku              | OP     | Rp253.000 | Rp346.000 | Rp724.000   | Rp599.000 |
| 32 | Maluku Utara        | OP     | Rp169.000 | Rp354.000 | Rp669.000   | Rp523.000 |
| 33 | Papua               | OP     | Rp293.000 | Rp478.000 | Rp990.000   | Rp771.000 |
| 34 | Papua Barat         | OP     | Rp284.000 | Rp421.000 | Rp1.120.000 | Rp705.000 |



32. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | FULLBOARD<br>DI LUAR<br>KOTA | FULLBOARD DI<br>DALAM KOTA | FULLDAY/<br>HALFDAY DI<br>DALAM KOTA | RESIDENCE DI<br>DALAM KOTA |
|-----|---------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2                   | 3      | 4                            | 5                          | 6                                    | 7                          |
| 1   | Aceh                | OH     | Rp120.000                    | Rp120.000                  | Rp85.000                             | Rp120.000                  |
| 2   | Sumatera Utara      | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 3   | Riau                | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp85.000                             | Rp130.000                  |
| 4   | Kepulauan Riau      | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 5   | Jambi               | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 6   | Sumatera Barat      | OH     | Rp120.000                    | Rp120.000                  | Rp85.000                             | Rp120.000                  |
| 7   | Sumatera Selatan    | OH     | Rp120.000                    | Rp120.000                  | Rp85.000                             | Rp120.000                  |
| 8   | Lampung             | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 9   | Bengkulu            | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 10  | Bangka Belitung     | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 11  | Banten              | OH     | Rp120.000                    | Rp120.000                  | Rp85.000                             | Rp120.000                  |
| 12  | Jawa Barat          | OH     | Rp150.000                    | Rp150.000                  | Rp105.000                            | Rp150.000                  |
| 13  | D.K.I. Jakarta      | OH     | Rp180.000                    | Rp180.000                  | Rp130.000                            | Rp180.000                  |
| 14  | Jawa Tengah         | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 15  | D.I. Yogyakarta     | OH     | Rp140.000                    | Rp140.000                  | Rp100.000                            | Rp140.000                  |
| 16  | Jawa Timur          | OH     | Rp140.000                    | Rp140.000                  | Rp100.000                            | Rp140.000                  |
| 17  | Bali                | OH     | Rp160.000                    | Rp160.000                  | Rp115.000                            | Rp160.000                  |
| 18  | Nusa Tenggara Barat | OH     | Rp150.000                    | Rp150.000                  | Rp105.000                            | Rp150.000                  |
| 19  | Nusa Tenggara Timur | OH     | Rp140.000                    | Rp140.000                  | Rp100.000                            | Rp140.000                  |
| 20  | Kalimantan Barat    | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 21  | Kalimantan Tengah   | OH     | Rp120.000                    | Rp120.000                  | Rp85.000                             | Rp120.000                  |
| 22  | Kalimantan Selatan  | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 23  | Kalimantan Timur    | OH     | Rp150.000                    | Rp150.000                  | Rp105.000                            | Rp150.000                  |
| 24  | Kalimantan Utara    | OH     | Rp150.000                    | Rp150.000                  | Rp105.000                            | Rp150.000                  |
| 25  | Sulawesi Utara      | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 26  | Gorontalo           | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 27  | Sulawesi Barat      | OH     | Rp120.000                    | Rp120.000                  | Rp85.000                             | Rp120.000                  |
| 28  | Sulawesi Selatan    | OH     | Rp150.000                    | Rp150.000                  | Rp105.000                            | Rp150.000                  |
| 29  | Sulawesi Tengah     | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 30  | Sulawesi Tenggara   | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 31  | Maluku              | OH     | Rp120.000                    | Rp120.000                  | Rp85.000                             | Rp120.000                  |
| 32  | Maluku Utara        | OH     | Rp130.000                    | Rp130.000                  | Rp95.000                             | Rp130.000                  |
| 33  | Papua               | OH     | Rp200.000                    | Rp200.000                  | Rp140.000                            | Rp200.000                  |
| 34  | Papua Barat         | OH     | Rp160.000                    | Rp160.000                  | Rp115.000                            | Rp160.000                  |



| NO  | URAIAN                                                              | SATUAN    | BESARAN         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1   | 2                                                                   | 3         | 4               |
| 33. | SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN                                         |           |                 |
|     | 33.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil                |           |                 |
|     | 33.1.1. Roda 4 (empat)                                              | Per hari  | Rp930.000       |
|     | 33.1.2. Roda 6 (enam)/Bus Sedang                                    | Per hari  | Rp3.282.000     |
|     | 33.1.3. Roda 6 (enam)/Bus Besar                                     | Per hari  | Rp4.638.000     |
|     | 33.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat                            |           |                 |
|     | 33.2.1. Pejabat Eselon II                                           | Per bulan | Rp14.180.000    |
|     | 33.3. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan           |           |                 |
|     | 33.3.1. Pick Up                                                     | Per bulan | Rp6.300.000     |
|     | 33.3.2. Minibus                                                     | Per bulan | Rp6.530.000     |
|     | 33.3.3. Double Gardan                                               | Per bulan | Rp15.230.000    |
| 34. | SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS                              |           |                 |
|     | 34.1. Kendaraan Dinas Pejabat                                       |           |                 |
|     | 34.1.1. Pejabat Eselon II                                           | Unit      | Rp515.263.000   |
|     | 34.2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) |           |                 |
|     | 34.2.1. Pick Up                                                     | Unit      | Rp236.677.000   |
|     | 34.2.2. Minibus                                                     | Unit      | Rp371.353.000   |
|     | 34.2.3. Double Gardan                                               | Unit      | Rp518.306.000   |
|     | 34.3. Kendaraan Operasional Bus                                     |           |                 |
|     | 34.3.1. Roda 4 dan/atau Bus Kecil                                   | Unit      | Rp360.942.000   |
|     | 34.3.2. Roda 6 dan/atau Bus Sedang                                  | Unit      | Rp718.252.000   |
|     | 34.3.3. Roda 6 dan/atau Bus Besar                                   | Unit      | Rp1.184.787.000 |
|     | 34.4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)   |           |                 |
|     | 34.4.1. Operasional                                                 | Unit      | Rp31.688.000    |
|     | 34.4.2. Lapangan                                                    | Unit      | Rp36.486.000    |
| 35. | SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS                                |           |                 |
|     | 35.1. Pakaian Dinas Dokter                                          | Setel     | Rp1.174.000     |
|     | 35.2. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat                                 | Setel     | Rp850.000       |
|     | 35.3. Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti       | Setel     | Rp650.000       |
|     | 35.4. Pakaian Kerja Satpam, Satpol PP dan WH                        | Setel     | Rp1.474.000     |
| 36. | SATUAN BIAYA MAKAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH                        | OH        | Rp19.000        |



PENJELASAN

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK), Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai dilingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP, besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPK, PA atau KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- d. ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah SPK yang membantu PA / KPA:
    - a) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk PPABP; dan
    - b) PA/KPA yang dibantu oleh PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
  - 2) jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) PA/KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
  - 3) jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
    - b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah



- pagu yang dikelola SPK; dan
- c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.
  - e. ketentuan jumlah PPK SKPK diatur sebagai berikut:
    - 1) jumlah PPK SKPK yang membantu PA/KPA:
      - a) PA/KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
      - b) PA/KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
    - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) PA/KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
    - 3) jumlah PPK SKPK untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
      - a) jumlah PPK SKPK tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPK sebelum penggabungan; dan
      - d) besaran honorarium PPK SKPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPK.
  - f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
  - g. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2.3. Honorarium Pengguna Anggaran  
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :
    - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PDBP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah petugas penerima PDBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PDBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PDBP setiap satuan kerja;

Dalam hal pengelola PDBP telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PDBP.

5. Honorarium Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

6. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa,



pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan buluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
  2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
  3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- 8.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas
- Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
  - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
    - 1) luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara atau masyarakat; atau
    - 2) dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar



50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

#### 8.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 8.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau masyarakat.

#### 8.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.



Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat kabupaten, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan                                              | Klasifikasi |    |     |
|----|------------------------------------------------------|-------------|----|-----|
|    |                                                      | I           | II | III |
| 1  | Pejabat Eselon II                                    | 2           | 3  | 4   |
| 2  | Pejabat Eselon III                                   | 3           | 4  | 5   |
| 3  | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional | 5           | 6  | 7   |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

9.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan



honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 9.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah kabupaten Bener Meriah dapat melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat kabupaten.

#### 10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara/Penasehat Hukum

##### 10.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau



persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

10.2. Honorarium Beracara/ Penasehat Hukum

Honorarium beracara/penasehat hukum diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara/sebagai penasehat hukum untuk mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

11. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, satuan biaya dimaksud dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum, kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah kabupaten;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

12. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.



13. Honorarium rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

14. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

14.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

14.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

14.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

*Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

15. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.



16. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan kabupaten.

17. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

17.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

17.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara.

17.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



17.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan  
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

17.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

18. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Honorarium tim anggaran pemerintah Kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.



19. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai ASN maupun Non ASN yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

20. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

20.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

20.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

21. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Sopir, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin SKPK, Satpam, Sopir, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin SKPK, Satpam, Sopir, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

Satuan Pengaman, Sopir, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

22. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada Pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.

Catatan:

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan



sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

23. Honorarium Satpam, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Jasa Sopir  
Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai satpam, petugas kebersihan, pramubakti, dan sopir berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. untuk satpam, petugas kebersihan, pramubakti dan sopir dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
  2. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  3. dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan; dan
  4. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di Kabupaten Bener Meriah lebih tinggi dari pada standar biaya umum dalam Peraturan Bupati ini, maka standar biaya umum ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
24. Kelompok Honorarium Tenaga Kontrak/Pelaksana dan Nama Lainnya untuk Non PNS  
Honorarium hanya diberikan kepada Tenaga Kontrak/Pelaksana dan nama lainnya untuk tenaga Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya sebagai Tenaga Kontrak/Pelaksana dan Adc.
25. Paket Perlengkapan Peralatan Pelatihan Per Peserta  
Satuan paket perlengkapan peralatan/atribut pelatihan per peserta merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan kegiatan pelatihan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.
26. Honorarium Jasa Pelatih  
Honorarium Jasa Pelatih dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk melatih masyarakat agar terampil.
27. Bonus Atlet  
Bonus Atlet merupakan kompensasi kepada seluruh atlet cabang olah raga.
28. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.  
Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang



dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat kabupaten;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

#### 28.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

##### a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.



Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips porter*, *tips pengemudi*, yang diberikan secara *lumpsum*.

29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk perjalanan dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
  - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau



- b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

30. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, di berikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

31. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat kabupaten atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di



luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

32. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, kegiatan *fullday/halfday* di dalam kota, dan *residence* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

33. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri



di tempat tujuan; atau

- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
  2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.
  3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
  3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
34. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
- Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan



biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Catatan:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

35. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2. PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan,



dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan PA/KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam, Satpol PP dan WH

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, satpol PP dan WH sudah termasuk perlengkapan (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos baju dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

36. Satuan Biaya Makan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

44. BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

| NO | URAIAN                                                                        | SATUAN        | BESARAN      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1  | 2                                                                             | 3             | 4            |
| 1. | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR                                       |               |              |
|    | 1.1. Inventaris Kantor                                                        | Pegawai/Tahun | Rp80.000     |
|    | 1.2. Personal Computer/Notebook                                               | Unit/Tahun    | Rp730.000    |
|    | 1.3. Printer                                                                  | Unit/Tahun    | Rp690.000    |
|    | 1.4. AC. Split                                                                | Unit/Tahun    | Rp610.000    |
|    | 1.5. Genset lebih kecil dari 50 KVA                                           | Unit/Tahun    | Rp7.190.000  |
|    | 1.6. Genset 75 KVA                                                            | Unit/Tahun    | Rp8.640.000  |
|    | 1.7. Genset 100 KVA                                                           | Unit/Tahun    | Rp10.150.000 |
|    | 1.8. Genset 125 KVA                                                           | Unit/Tahun    | Rp10.780.000 |
|    | 1.9. Genset 150 KVA                                                           | Unit/Tahun    | Rp13.260.000 |
|    | 1.10. Genset 175 KVA                                                          | Unit/Tahun    | Rp14.810.000 |
|    | 1.11. Genset 200 KVA                                                          | Unit/Tahun    | Rp15.850.000 |
|    | 1.12. Genset 250 KVA                                                          | Unit/Tahun    | Rp16.790.000 |
|    | 1.13. Genset 275 KVA                                                          | Unit/Tahun    | Rp17.760.000 |
|    | 1.14. Genset 300 KVA                                                          | Unit/Tahun    | Rp20.960.000 |
|    | 1.15. Genset 350 KVA                                                          | Unit/Tahun    | Rp22.960.000 |
|    | 1.16. Genset 450 KVA                                                          | Unit/Tahun    | Rp25.620.000 |
|    | 1.17. Genset 500 KVA                                                          | Unit/Tahun    | Rp31.770.000 |
| 2. | SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH PERGI PULANG (PP) | Orang/Kali    | Rp150.000    |
| 3. | SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN                                      |               |              |
|    | 3.1. Dari Bahasa Asing ke bahasa Indonesia atau Sebaliknya                    |               |              |
|    | a. Bahasa Inggris                                                             | Halaman Jadi  | Rp250.000    |
|    | b. Bahasa Jepang                                                              | Halaman Jadi  | Rp420.000    |
|    | c. Bahasa Mandarin                                                            | Halaman Jadi  | Rp410.000    |
|    | d. Bahasa Belanda                                                             | Halaman Jadi  | Rp450.000    |
|    | e. Bahasa Perancis                                                            | Halaman Jadi  | Rp366.000    |
|    | f. Bahasa Jerman                                                              | Halaman Jadi  | Rp414.000    |
|    | g. Bahasa Asing Lainnya                                                       | Halaman Jadi  | Rp300.000    |
|    | 3.2. Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya      | Halaman Jadi  | Rp174.000    |
| 4. | SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/ NONGELAR DALAM NEGERI KHUSUS ASN |               |              |
|    | 4.1. Program Diploma III, dan Diploma IV/Strata 1                             |               |              |
|    | a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional                                          |               |              |
|    | - Diploma I dan Diploma III                                                   | OT            | Rp16.070.000 |
|    | - Diploma IV dan Strata 1                                                     | OT            | Rp17.010.000 |
|    | b. Uang Buku dan Referensi                                                    |               |              |
|    | - Diploma I                                                                   | OT            | Rp1.330.000  |
|    | - Diploma III                                                                 | OT            | Rp1.590.000  |
|    | - Diploma IV dan Strata 1                                                     | OT            | Rp1.850.000  |
|    | 4.2. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2                                  |               |              |
|    | a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional                                          |               |              |
|    | - Strata 2 dan Spesialis 1                                                    | OT            | Rp20.690.000 |
|    | - Strata 3 dan Spesialis 2                                                    | OT            | Rp21.320.000 |
|    | b. Uang Buku dan Referensi                                                    |               |              |
|    | - Strata 2 dan Spesialis 1                                                    | OT            | Rp2.120.000  |
|    | - Strata 3 dan Spesialis 2                                                    | OT            | Rp2.380.000  |



| NO    | URAIAN                                                                                              | SATUAN                | BESARAN      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                   | 3                     | 4            |
| 5.    | SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI                                                                    | Unit/Bulan            | Rp5.500.000  |
| 6.    | HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL                                    |                       |              |
| 6.1.  | Honorarium Narasumber                                                                               | OJ                    | Rp1.700.000  |
| 6.2.  | Honorarium Moderator                                                                                | OK                    | Rp700.000    |
| 6.3.  | Honorarium Pembawa Acara                                                                            | OK                    | Rp400.000    |
| 7.    | SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN                                                                |                       |              |
| 7.1.  | Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) |                       |              |
|       | a. Pasien Rumah Sakit                                                                               | OH                    | Rp32.000     |
|       | b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                   | OH                    | Rp27.000     |
| 7.2.  | Pengadaan Bahan Makanan untuk <i>Rescue Team</i>                                                    | OH                    | Rp37.000     |
| 8.    | SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN HARIAN                                                              |                       |              |
| 8.1.  | Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Setara                                                       |                       |              |
|       | a. Makanan                                                                                          | Orang/Kali            | Rp110.000    |
|       | b. Kudapan (Snack)                                                                                  | Orang/Kali            | Rp49.000     |
| 8.2.  | Rapat Biasa                                                                                         |                       |              |
|       | a. Makanan                                                                                          | Orang/Kali            | Rp51.000     |
|       | b. Kudapan (Snack)                                                                                  | Orang/Kali            | Rp19.000     |
| 8.3.  | Makan/Minum/Snack Harian Kegiatan                                                                   |                       |              |
|       | a. Makan                                                                                            | Orang/Kali            | Rp30.000     |
|       | b. Minum                                                                                            | Orang/Kali            | Rp10.000     |
|       | c. <i>Snack</i>                                                                                     | Orang/Kali            | Rp10.000     |
| 9.    | SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN                                                      |                       |              |
| 9.1.  | Memiliki Sampai Dengan 40 Pegawai                                                                   | Satker/Tahun          | Rp60.870.000 |
| 9.2.  | Memiliki Lebih Dari 40 Pegawai                                                                      | OT                    | Rp1.530.000  |
| 10.   | SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU            | Pegawai/Tahun         | Rp1.946.000  |
| 11.   | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS                                                           |                       |              |
| 11.1. | Kendaraan Dinas Pejabat                                                                             |                       |              |
|       | a. Kepala Daerah                                                                                    | Unit/Tahun            | Rp41.900.000 |
|       | b. Pimpinan DPRK                                                                                    | Unit/Tahun            | Rp40.000.000 |
|       | c. Pejabat Eselon II.a                                                                              | Unit/Tahun            | Rp39.000.000 |
|       | d. Pejabat Eselon II.b                                                                              | Unit/Tahun            | Rp35.000.000 |
|       | e. Pejabat Eselon III                                                                               | Unit/Tahun            | Rp30.000.000 |
| 11.2. | Kendaraan Dinas Operasional                                                                         |                       |              |
|       | a. Roda 4 (empat)                                                                                   | Unit/Tahun            | Rp34.620.000 |
|       | b. Double Gardan                                                                                    | Unit/Tahun            | Rp37.640.000 |
|       | c. Roda 2 (dua)                                                                                     | Unit/Tahun            | Rp3.930.000  |
| 11.3. | Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 (enam), dan Speed Boat                                  |                       |              |
|       | a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor                                                              | Unit/Tahun            | Rp9.750.000  |
|       | b. Roda 6 (enam)                                                                                    | Unit/Tahun            | Rp37.110.000 |
|       | c. Speed Boat                                                                                       | Unit/Tahun            | Rp20.240.000 |
| 11.4. | Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa                                               |                       |              |
|       | a. Pejabat Eselon II                                                                                | Unit/Tahun            | Rp27.000.000 |
|       | b. Operasional Kantor dan/atau Lapangan                                                             | Unit/Tahun            | Rp25.000.000 |
| 12.   | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI                                         |                       |              |
| 12.1. | Gedung Bertingkat                                                                                   | m <sup>2</sup> /tahun | Rp192.000    |
| 12.2. | Gedung Tidak Bertingkat                                                                             | m <sup>2</sup> /tahun | Rp148.000    |
| 12.3. | Halaman Gedung /Bangunan Kantor                                                                     | m <sup>2</sup> /tahun | Rp10.000     |
| 13.   | SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN                                                                  |                       |              |
| 13.1. | Kapasitas 70 orang                                                                                  | Aula/Hari             | Rp1.500.000  |
| 13.2. | Kapasitas 400 orang                                                                                 | Aula/Hari             | Rp2.500.000  |



14. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA  
DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN / KOTA<br>TUJUAN | SATUAN     | BESARAN   |
|-----|------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 1   | 2                | 3                          | 4          | 5         |
|     | ACEH             |                            |            |           |
| 1.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Barat            | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 2.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Barat Daya       | Orang/Kali | Rp298.000 |
| 3.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Besar            | Orang/Kali | Rp183.000 |
| 4.  | Banda Aceh       | Kab Aceh Jaya              | Orang/Kali | Rp238.000 |
| 5.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Selatan          | Orang/Kali | Rp325.000 |
| 6.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Singkil          | Orang/Kali | Rp420.000 |
| 7.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tamiang          | Orang/Kali | Rp315.000 |
| 8.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tengah           | Orang/Kali | Rp293.000 |
| 9.  | Banda Aceh       | Kab. Aceh Tenggara         | Orang/Kali | Rp460.000 |
| 10. | Banda Aceh       | Kab. Aceh Timur            | Orang/Kali | Rp289.000 |
| 11. | Banda Aceh       | Kab. Aceh Utara            | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 12. | Banda Aceh       | Kab. Bener Meriah          | Orang/Kali | Rp278.000 |
| 13. | Banda Aceh       | Kab. Bireuen               | Orang/Kali | Rp220.000 |
| 14. | Banda Aceh       | Kab. Gayo Lues             | Orang/Kali | Rp370.000 |
| 15. | Banda Aceh       | Kab. Nagan Raya            | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 16. | Banda Aceh       | Kab. Pidie                 | Orang/Kali | Rp190.000 |
| 17. | Banda Aceh       | Kab. Pidie Jaya            | Orang/Kali | Rp205.000 |
| 18. | Banda Aceh       | Kota Langsa                | Orang/Kali | Rp301.000 |
| 19. | Banda Aceh       | Kota Lhokseumawe           | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 20. | Banda Aceh       | Kota Subulussalam          | Orang/Kali | Rp400.000 |



15. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO. | PROVINSI            | SATUAN     | BESARAN   |
|-----|---------------------|------------|-----------|
| 1   | 2                   | 3          | 4         |
| 1.  | ACEH                | Orang/Kali | Rp123.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | Orang/Kali | Rp232.000 |
| 3.  | RIAU                | Orang/Kali | Rp94.000  |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | Orang/Kali | Rp137.000 |
| 5.  | JAMBI               | Orang/Kali | Rp147.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | Orang/Kali | Rp190.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Orang/Kali | Rp128.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | Orang/Kali | Rp167.000 |
| 9.  | BENGKULU            | Orang/Kali | Rp109.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Orang/Kali | Rp90.000  |
| 11. | BANTEN              | Orang/Kali | Rp446.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | Orang/Kali | Rp166.000 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | Orang/Kali | Rp256.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | Orang/Kali | Rp75.000  |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | Orang/Kali | Rp118.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | Orang/Kali | Rp194.000 |
| 17. | BALI                | Orang/Kali | Rp159.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | Rp231.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | Rp108.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Orang/Kali | Rp135.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/Kali | Rp111.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/Kali | Rp150.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/Kali | Rp450.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Orang/Kali | Rp102.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Orang/Kali | Rp138.000 |
| 26. | GORONTALO           | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Orang/Kali | Rp313.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Orang/Kali | Rp145.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Orang/Kali | Rp165.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Orang/Kali | Rp171.000 |
| 31. | MALUKU              | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | Orang/Kali | Rp215.000 |
| 33. | PAPUA               | Orang/Kali | Rp431.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | Orang/Kali | Rp182.000 |



16. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

| NO. | KOTA    |                | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|-----|---------|----------------|--------------------|--------------|
|     | ASAL    | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI      |
| 1   | 2       | 3              | 4                  | 5            |
| 1.  | JAKARTA | AMBON          | Rp13.285.000       | Rp7.081.000  |
| 2.  | JAKARTA | BALIKPAPAN     | Rp7.412.000        | Rp3.797.000  |
| 3.  | JAKARTA | BANDA ACEH     | Rp7.519.000        | Rp4.492.000  |
| 4.  | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | Rp2.407.000        | Rp1.583.000  |
| 5.  | JAKARTA | BANJARMASIN    | Rp5.252.000        | Rp2.995.000  |
| 6.  | JAKARTA | BATAM          | Rp4.867.000        | Rp2.888.000  |
| 7.  | JAKARTA | BENGKULU       | Rp4.364.000        | Rp2.621.000  |
| 8.  | JAKARTA | BIAK           | Rp14.065.000       | Rp7.519.000  |
| 9.  | JAKARTA | DENPASAR       | Rp5.305.000        | Rp3.262.000  |
| 10. | JAKARTA | GORONTALO      | Rp7.231.000        | Rp4.824.000  |
| 11. | JAKARTA | JAMBI          | Rp4.065.000        | Rp2.460.000  |
| 12. | JAKARTA | JAYAPURA       | Rp14.568.000       | Rp8.193.000  |
| 13. | JAKARTA | YOGYAKARTA     | Rp4.107.000        | Rp2.268.000  |
| 14. | JAKARTA | KENDARI        | Rp7.658.000        | Rp4.182.000  |
| 15. | JAKARTA | KUPANG         | Rp9.413.000        | Rp5.081.000  |
| 16. | JAKARTA | MAKASSAR       | Rp7.444.000        | Rp3.829.000  |
| 17. | JAKARTA | MALANG         | Rp4.599.000        | Rp2.695.000  |
| 18. | JAKARTA | MAMUJU         | Rp7.295.000        | Rp4.867.000  |
| 19. | JAKARTA | MANADO         | Rp10.824.000       | Rp5.102.000  |
| 20. | JAKARTA | MANOKWARI      | Rp16.226.000       | Rp10.824.000 |
| 21. | JAKARTA | MATARAM        | Rp5.316.000        | Rp3.230.000  |
| 22. | JAKARTA | MEDAN          | Rp7.252.000        | Rp3.808.000  |
| 23. | JAKARTA | PADANG         | Rp5.530.000        | Rp2.952.000  |
| 24. | JAKARTA | PALANGKARAYA   | Rp4.984.000        | Rp2.984.000  |
| 25. | JAKARTA | PALEMBANG      | Rp3.861.000        | Rp2.268.000  |
| 26. | JAKARTA | PALU           | Rp9.348.000        | Rp5.113.000  |
| 27. | JAKARTA | PANGKAL PINANG | Rp3.412.000        | Rp2.139.000  |
| 28. | JAKARTA | PEKANBARU      | Rp5.583.000        | Rp3.016.000  |
| 29. | JAKARTA | PONTIANAK      | Rp4.353.000        | Rp2.781.000  |
| 30. | JAKARTA | SEMARANG       | Rp3.861.000        | Rp2.182.000  |
| 31. | JAKARTA | SOLO           | Rp3.861.000        | Rp2.342.000  |
| 32. | JAKARTA | SURABAYA       | Rp5.466.000        | Rp2.674.000  |
| 33. | JAKARTA | TERNATE        | Rp10.001.000       | Rp6.664.000  |
| 34. | JAKARTA | TIMIKA         | Rp13.830.000       | Rp7.487.000  |
| 35. | AMBON   | DENPASAR       | Rp8.054.000        | Rp4.471.000  |
| 36. | AMBON   | JAYAPURA       | Rp7.434.000        | Rp4.161.000  |
| 37. | AMBON   | KENDARI        | Rp4.824.000        | Rp2.856.000  |
| 38. | AMBON   | MAKASSAR       | Rp6.022.000        | Rp3.455.000  |
| 39. | AMBON   | MANOKWARI      | Rp5.177.000        | Rp3.027.000  |
| 40. | AMBON   | PALU           | Rp6.140.000        | Rp3.508.000  |
| 41. | AMBON   | SORONG         | Rp3.637.000        | Rp2.257.000  |



| NO. | KOTA           |             | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|-----|----------------|-------------|--------------------|--------------|
|     | ASAL           | TUJUAN      | BISNIS             | EKONOMI      |
| 1   | 2              | 3           | 4                  | 5            |
| 42. | AMBON          | SURABAYA    | Rp8.803.000        | Rp4.845.000  |
| 43. | AMBON          | TERNATE     | Rp4.022.000        | Rp2.449.000  |
| 44. | BALIKPAPAN     | BANDA ACEH  | Rp12.739.000       | Rp6.749.000  |
| 45. | BALIKPAPAN     | BATAM       | Rp10.354.000       | Rp5.305.000  |
| 46. | BALIKPAPAN     | DENPASAR    | Rp10.739.000       | Rp5.648.000  |
| 47. | BALIKPAPAN     | JAYAPURA    | Rp19.071.000       | Rp10.086.000 |
| 48. | BALIKPAPAN     | YOGYAKARTA  | Rp9.669.000        | Rp4.749.000  |
| 49. | BALIKPAPAN     | MAKASSAR    | Rp12.664.000       | Rp6.150.000  |
| 50. | BALIKPAPAN     | MANADO      | Rp15.702.000       | Rp7.295.000  |
| 51. | BALIKPAPAN     | MEDAN       | Rp12.493.000       | Rp6.140.000  |
| 52. | BALIKPAPAN     | PADANG      | Rp10.942.000       | Rp5.369.000  |
| 53. | BALIKPAPAN     | PALEMBANG   | Rp9.445.000        | Rp4.749.000  |
| 54. | BALIKPAPAN     | PEKANBARU   | Rp10.996.000       | Rp5.423.000  |
| 55. | BALIKPAPAN     | SEMARANG    | Rp9.445.000        | Rp4.674.000  |
| 56. | BALIKPAPAN     | SOLO        | Rp9.445.000        | Rp4.813.000  |
| 57. | BALIKPAPAN     | SURABAYA    | Rp10.889.000       | Rp5.113.000  |
| 58. | BALIKPAPAN     | TIMIKA      | Rp18.408.000       | Rp9.445.000  |
| 59. | BANDA ACEH     | DENPASAR    | Rp10.835.000       | Rp6.279.000  |
| 60. | BANDA ACEH     | JAYAPURA    | Rp19.167.000       | Rp10.717.000 |
| 61. | BANDA ACEH     | YOGYAKARTA  | Rp9.765.000        | Rp5.380.000  |
| 62. | BANDA ACEH     | MAKASSAR    | Rp12.760.000       | Rp6.781.000  |
| 63. | BANDA ACEH     | MANADO      | Rp15.798.000       | Rp7.926.000  |
| 64. | BANDA ACEH     | PONTIANAK   | Rp9.990.000        | Rp5.840.000  |
| 65. | BANDA ACEH     | SEMARANG    | Rp9.530.000        | Rp5.305.000  |
| 66. | BANDA ACEH     | SOLO        | Rp9.530.000        | Rp5.444.000  |
| 67. | BANDA ACEH     | SURABAYA    | Rp10.985.000       | Rp5.744.000  |
| 68. | BANDA ACEH     | TIMIKA      | Rp18.504.000       | Rp10.076.000 |
| 69. | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN  | Rp8.129.000        | Rp4.129.000  |
| 70. | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH  | Rp8.225.000        | Rp4.760.000  |
| 71. | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN | Rp6.193.000        | Rp3.412.000  |
| 72. | BANDAR LAMPUNG | BATAM       | Rp5.840.000        | Rp3.316.000  |
| 73. | BANDAR LAMPUNG | BIAK        | Rp14.119.000       | Rp7.487.000  |
| 74. | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR    | Rp6.236.000        | Rp3.647.000  |
| 75. | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA    | Rp14.568.000       | Rp8.097.000  |
| 76. | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA  | Rp5.155.000        | Rp2.760.000  |
| 77. | BANDAR LAMPUNG | KENDARI     | Rp8.354.000        | Rp4.482.000  |
| 78. | BANDAR LAMPUNG | MAKASSAR    | Rp8.161.000        | Rp4.161.000  |
| 79. | BANDAR LAMPUNG | MALANG      | Rp5.594.000        | Rp3.134.000  |
| 80. | BANDAR LAMPUNG | MANADO      | Rp11.199.000       | Rp5.305.000  |
| 81. | BANDAR LAMPUNG | MATARAM     | Rp6.246.000        | Rp3.626.000  |
| 82. | BANDAR LAMPUNG | MEDAN       | Rp7.979.000        | Rp4.150.000  |
| 83. | BANDAR LAMPUNG | PADANG      | Rp6.439.000        | Rp3.380.000  |



| NO.  | KOTA           |                | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
|      | ASAL           | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI     |
| 1    | 2              | 3              | 4                  | 5           |
| 84.  | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA   | Rp5.947.000        | Rp3.401.000 |
| 85.  | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG      | Rp4.931.000        | Rp2.760.000 |
| 86.  | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU      | Rp6.482.000        | Rp3.433.000 |
| 87.  | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK      | Rp5.380.000        | Rp3.220.000 |
| 88.  | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG       | Rp4.931.000        | Rp2.685.000 |
| 89.  | BANDAR LAMPUNG | SOLO           | Rp4.931.000        | Rp2.824.000 |
| 90.  | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA       | Rp6.386.000        | Rp3.123.000 |
| 91.  | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA         | Rp13.905.000       | Rp7.455.000 |
| 92.  | BANDUNG        | BATAM          | Rp6.289.000        | Rp3.583.000 |
| 93.  | BANDUNG        | DENPASAR       | Rp5.626.000        | Rp3.252.000 |
| 94.  | BANDUNG        | JAKARTA        | Rp2.064.000        | Rp1.476.000 |
| 95.  | BANDUNG        | JAMBI          | Rp5.006.000        | Rp2.941.000 |
| 96.  | BANDUNG        | YOGYAKARTA     | Rp3.369.000        | Rp2.129.000 |
| 97.  | BANDUNG        | PADANG         | Rp6.129.000        | Rp3.508.000 |
| 98.  | BANDUNG        | PALEMBANG      | Rp4.385.000        | Rp2.631.000 |
| 99.  | BANDUNG        | PANGKAL PINANG | Rp4.599.000        | Rp2.738.000 |
| 100. | BANDUNG        | PEKANBARU      | Rp6.525.000        | Rp3.701.000 |
| 101. | BANDUNG        | SEMARANG       | Rp3.027.000        | Rp1.957.000 |
| 102. | BANDUNG        | SOLO           | Rp3.647.000        | Rp2.268.000 |
| 103. | BANDUNG        | SURABAYA       | Rp4.824.000        | Rp2.856.000 |
| 104. | BANDUNG        | TANJUNG PANDAN | Rp4.439.000        | Rp2.663.000 |
| 105. | BANJARMASIN    | BANDA ACEH     | Rp10.792.000       | Rp6.022.000 |
| 106. | BANJARMASIN    | BATAM          | Rp8.407.000        | Rp4.578.000 |
| 107. | BANJARMASIN    | BIAK           | Rp16.686.000       | Rp8.749.000 |
| 108. | BANJARMASIN    | DENPASAR       | Rp8.792.000        | Rp4.920.000 |
| 109. | BANJARMASIN    | JAYAPURA       | Rp17.135.000       | Rp9.359.000 |
| 110. | BANJARMASIN    | YOGYAKARTA     | Rp7.723.000        | Rp4.022.000 |
| 111. | BANJARMASIN    | MEDAN          | Rp10.546.000       | Rp5.412.000 |
| 112. | BANJARMASIN    | PADANG         | Rp9.006.000        | Rp4.642.000 |
| 113. | BANJARMASIN    | PALEMBANG      | Rp7.498.000        | Rp4.022.000 |
| 114. | BANJARMASIN    | PEKANBARU      | Rp9.049.000        | Rp4.696.000 |
| 115. | BANJARMASIN    | SEMARANG       | Rp7.498.000        | Rp3.958.000 |
| 116. | BANJARMASIN    | SOLO           | Rp7.498.000        | Rp4.097.000 |
| 117. | BANJARMASIN    | SURABAYA       | Rp8.942.000        | Rp4.385.000 |
| 118. | BANJARMASIN    | TIMIKA         | Rp16.472.000       | Rp8.717.000 |
| 119. | BATAM          | BANDA ACEH     | Rp10.439.000       | Rp5.936.000 |
| 120. | BATAM          | DENPASAR       | Rp8.450.000        | Rp4.824.000 |
| 121. | BATAM          | JAYAPURA       | Rp16.782.000       | Rp9.263.000 |
| 122. | BATAM          | YOGYAKARTA     | Rp7.370.000        | Rp3.936.000 |
| 123. | BATAM          | MAKASSAR       | Rp10.375.000       | Rp5.337.000 |
| 124. | BATAM          | MANADO         | Rp13.413.000       | Rp6.482.000 |
| 125. | BATAM          | MEDAN          | Rp10.193.000       | Rp5.316.000 |



| NO.  | KOTA     |              | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|------|----------|--------------|--------------------|--------------|
|      | ASAL     | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI      |
| 1    | 2        | 3            | 4                  | 5            |
| 126. | BATAM    | PADANG       | Rp8.653.000        | Rp4.546.000  |
| 127. | BATAM    | PALEMBANG    | Rp7.145.000        | Rp3.936.000  |
| 128. | BATAM    | PEKANBARU    | Rp8.707.000        | Rp4.599.000  |
| 129. | BATAM    | PONTIANAK    | Rp7.594.000        | Rp4.396.000  |
| 130. | BATAM    | SEMARANG     | Rp7.145.000        | Rp3.861.000  |
| 131. | BATAM    | SOLO         | Rp7.145.000        | Rp4.000.000  |
| 132. | BATAM    | SURABAYA     | Rp8.600.000        | Rp4.300.000  |
| 133. | BATAM    | TIMIKA       | Rp16.119.000       | Rp8.621.000  |
| 134. | BENGKULU | PALEMBANG    | Rp2.899.000        | Rp1.893.000  |
| 135. | BIAK     | BALIKPAPAN   | Rp18.622.000       | Rp9.477.000  |
| 136. | BIAK     | BANDA ACEH   | Rp18.718.000       | Rp10.108.000 |
| 137. | BIAK     | BATAM        | Rp16.333.000       | Rp8.664.000  |
| 138. | BIAK     | DENPASAR     | Rp16.729.000       | Rp8.995.000  |
| 139. | BIAK     | JAYAPURA     | Rp3.615.000        | Rp2.321.000  |
| 140. | BIAK     | YOGYAKARTA   | Rp15.648.000       | Rp8.108.000  |
| 141. | BIAK     | MANADO       | Rp11.734.000       | Rp6.353.000  |
| 142. | BIAK     | MEDAN        | Rp18.472.000       | Rp9.498.000  |
| 143. | BIAK     | PADANG       | Rp16.932.000       | Rp8.728.000  |
| 144. | BIAK     | PALEMBANG    | Rp15.424.000       | Rp8.108.000  |
| 145. | BIAK     | PEKANBARU    | Rp16.985.000       | Rp8.781.000  |
| 146. | BIAK     | PONTIANAK    | Rp15.873.000       | Rp8.568.000  |
| 147. | BIAK     | SURABAYA     | Rp12.782.000       | Rp7.081.000  |
| 148. | BIAK     | TIMIKA       | Rp5.808.000        | Rp3.444.000  |
| 149. | DENPASAR | JAYAPURA     | Rp11.680.000       | Rp6.845.000  |
| 150. | DENPASAR | KUPANG       | Rp5.091.000        | Rp2.952.000  |
| 151. | DENPASAR | MAKASSAR     | Rp4.182.000        | Rp2.631.000  |
| 152. | DENPASAR | MANADO       | Rp7.851.000        | Rp4.278.000  |
| 153. | DENPASAR | MATARAM      | Rp1.840.000        | Rp1.390.000  |
| 154. | DENPASAR | MEDAN        | Rp10.589.000       | Rp5.658.000  |
| 155. | DENPASAR | PADANG       | Rp9.049.000        | Rp4.888.000  |
| 156. | DENPASAR | PALANGKARAYA | Rp8.557.000        | Rp4.909.000  |
| 157. | DENPASAR | PALEMBANG    | Rp7.541.000        | Rp4.278.000  |
| 158. | DENPASAR | PEKANBARU    | Rp9.092.000        | Rp4.942.000  |
| 159. | DENPASAR | PONTIANAK    | Rp7.990.000        | Rp4.738.000  |
| 160. | DENPASAR | TIMIKA       | Rp10.140.000       | Rp6.129.000  |
| 161. | JAMBI    | BALIKPAPAN   | Rp7.733.000        | Rp4.407.000  |
| 162. | JAMBI    | BANJARMASIN  | Rp7.690.000        | Rp4.193.000  |
| 163. | JAMBI    | DENPASAR     | Rp7.733.000        | Rp4.439.000  |
| 164. | JAMBI    | YOGYAKARTA   | Rp6.653.000        | Rp3.551.000  |
| 165. | JAMBI    | KUPANG       | Rp11.434.000       | Rp6.075.000  |
| 166. | JAMBI    | MAKASSAR     | Rp9.659.000        | Rp4.952.000  |
| 167. | JAMBI    | MALANG       | Rp7.091.000        | Rp3.925.000  |



| NO.  | KOTA       |              | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|------|------------|--------------|--------------------|--------------|
|      | ASAL       | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI      |
| 1    | 2          | 3            | 4                  | 5            |
| 168. | JAMBI      | MANADO       | Rp12.707.000       | Rp6.097.000  |
| 169. | JAMBI      | PALANGKARAYA | Rp7.444.000        | Rp4.193.000  |
| 170. | JAMBI      | PONTIANAK    | Rp6.878.000        | Rp4.011.000  |
| 171. | JAMBI      | SEMARANG     | Rp6.428.000        | Rp3.476.000  |
| 172. | JAMBI      | SOLO         | Rp6.428.000        | Rp3.615.000  |
| 173. | JAMBI      | SURABAYA     | Rp7.883.000        | Rp3.915.000  |
| 174. | JAYAPURA   | YOGYAKARTA   | Rp13.274.000       | Rp7.690.000  |
| 175. | JAYAPURA   | MANADO       | Rp22.109.000       | Rp11.263.000 |
| 176. | JAYAPURA   | MEDAN        | Rp18.932.000       | Rp10.097.000 |
| 177. | JAYAPURA   | PADANG       | Rp17.381.000       | Rp9.327.000  |
| 178. | JAYAPURA   | PALEMBANG    | Rp15.873.000       | Rp8.717.000  |
| 179. | JAYAPURA   | PEKANBARU    | Rp17.435.000       | Rp9.380.000  |
| 180. | JAYAPURA   | PONTIANAK    | Rp16.322.000       | Rp9.177.000  |
| 181. | JAYAPURA   | TIMIKA       | Rp3.615.000        | Rp2.289.000  |
| 182. | YOGYAKARTA | DENPASAR     | Rp3.861.000        | Rp2.481.000  |
| 183. | YOGYAKARTA | MAKASSAR     | Rp6.525.000        | Rp3.893.000  |
| 184. | YOGYAKARTA | MANADO       | Rp10.536.000       | Rp5.722.000  |
| 185. | YOGYAKARTA | MEDAN        | Rp9.519.000        | Rp4.770.000  |
| 186. | YOGYAKARTA | PADANG       | Rp7.969.000        | Rp4.000.000  |
| 187. | YOGYAKARTA | PALEMBANG    | Rp6.460.000        | Rp3.380.000  |
| 188. | YOGYAKARTA | PEKANBARU    | Rp8.022.000        | Rp4.054.000  |
| 189. | YOGYAKARTA | PONTIANAK    | Rp6.910.000        | Rp3.840.000  |
| 190. | YOGYAKARTA | TIMIKA       | Rp11.894.000       | Rp7.038.000  |
| 191. | KENDARI    | BANDA ACEH   | Rp12.953.000       | Rp7.102.000  |
| 192. | KENDARI    | BATAM        | Rp10.568.000       | Rp5.658.000  |
| 193. | KENDARI    | DENPASAR     | Rp5.455.000        | Rp3.273.000  |
| 194. | KENDARI    | YOGYAKARTA   | Rp8.129.000        | Rp4.706.000  |
| 195. | KENDARI    | PADANG       | Rp11.167.000       | Rp5.722.000  |
| 196. | KENDARI    | PALEMBANG    | Rp9.659.000        | Rp5.102.000  |
| 197. | KENDARI    | PEKANBARU    | Rp11.220.000       | Rp5.776.000  |
| 198. | KENDARI    | SEMARANG     | Rp9.659.000        | Rp5.027.000  |
| 199. | KENDARI    | SOLO         | Rp9.659.000        | Rp5.166.000  |
| 200. | KENDARI    | SURABAYA     | Rp11.103.000       | Rp5.466.000  |
| 201. | KENDARI    | TIMIKA       | Rp18.633.000       | Rp9.798.000  |
| 202. | KUPANG     | JAYAPURA     | Rp14.386.000       | Rp8.108.000  |
| 203. | KUPANG     | YOGYAKARTA   | Rp7.348.000        | Rp4.182.000  |
| 204. | KUPANG     | MAKASSAR     | Rp7.637.000        | Rp4.311.000  |
| 205. | KUPANG     | MANADO       | Rp11.648.000       | Rp6.140.000  |
| 206. | KUPANG     | SURABAYA     | Rp6.749.000        | Rp3.722.000  |
| 207. | MAKASSAR   | BIAK         | Rp8.493.000        | Rp4.931.000  |
| 208. | MAKASSAR   | JAYAPURA     | Rp10.193.000       | Rp5.787.000  |
| 209. | MAKASSAR   | KENDARI      | Rp2.663.000        | Rp1.786.000  |



| NO.  | KOTA     |              | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|----------|--------------|--------------------|-------------|
|      | ASAL     | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI     |
| 1    | 2        | 3            | 4                  | 5           |
| 210. | MAKASSAR | MANADO       | Rp5.327.000        | Rp2.909.000 |
| 211. | MAKASSAR | TIMIKA       | Rp11.723.000       | Rp6.567.000 |
| 212. | MALANG   | BALIKPAPAN   | Rp10.108.000       | Rp5.134.000 |
| 213. | MALANG   | BANDA ACEH   | Rp10.204.000       | Rp5.765.000 |
| 214. | MALANG   | BANJARMASIN  | Rp8.161.000        | Rp4.407.000 |
| 215. | MALANG   | BATAM        | Rp7.819.000        | Rp4.311.000 |
| 216. | MALANG   | BIAK         | Rp16.087.000       | Rp8.482.000 |
| 217. | MALANG   | JAYAPURA     | Rp16.536.000       | Rp9.092.000 |
| 218. | MALANG   | KENDARI      | Rp10.322.000       | Rp5.487.000 |
| 219. | MALANG   | MAKASSAR     | Rp10.129.000       | Rp5.166.000 |
| 220. | MALANG   | MANADO       | Rp13.167.000       | Rp6.311.000 |
| 221. | MALANG   | MEDAN        | Rp9.958.000        | Rp5.145.000 |
| 222. | MALANG   | PADANG       | Rp8.418.000        | Rp4.385.000 |
| 223. | MALANG   | PALANGKARAYA | Rp7.915.000        | Rp4.407.000 |
| 224. | MALANG   | PALEMBANG    | Rp6.899.000        | Rp3.765.000 |
| 225. | MALANG   | PEKANBARU    | Rp8.461.000        | Rp4.439.000 |
| 226. | MALANG   | TIMIKA       | Rp15.873.000       | Rp8.461.000 |
| 227. | MANADO   | MEDAN        | Rp15.552.000       | Rp7.316.000 |
| 228. | MANADO   | PADANG       | Rp14.012.000       | Rp6.546.000 |
| 229. | MANADO   | PALEMBANG    | Rp12.504.000       | Rp5.926.000 |
| 230. | MANADO   | PEKANBARU    | Rp14.055.000       | Rp6.599.000 |
| 231. | MANADO   | PONTIANAK    | Rp12.953.000       | Rp6.396.000 |
| 232. | MANADO   | SEMARANG     | Rp12.504.000       | Rp5.851.000 |
| 233. | MANADO   | SOLO         | Rp12.504.000       | Rp5.990.000 |
| 234. | MANADO   | SURABAYA     | Rp9.937.000        | Rp5.262.000 |
| 235. | MANADO   | TIMIKA       | Rp16.183.000       | Rp8.995.000 |
| 236. | MATARAM  | BALIKPAPAN   | Rp10.750.000       | Rp5.615.000 |
| 237. | MATARAM  | BANDA ACEH   | Rp10.846.000       | Rp6.246.000 |
| 238. | MATARAM  | BANJARMASIN  | Rp8.803.000        | Rp4.888.000 |
| 239. | MATARAM  | BATAM        | Rp8.461.000        | Rp4.803.000 |
| 240. | MATARAM  | BIAK         | Rp11.552.000       | Rp6.546.000 |
| 241. | MATARAM  | JAYAPURA     | Rp13.092.000       | Rp7.327.000 |
| 242. | MATARAM  | YOGYAKARTA   | Rp4.417.000        | Rp2.781.000 |
| 243. | MATARAM  | MAKASSAR     | Rp4.717.000        | Rp2.909.000 |
| 244. | MATARAM  | MANADO       | Rp8.717.000        | Rp4.738.000 |
| 245. | MATARAM  | MEDAN        | Rp10.600.000       | Rp5.637.000 |
| 246. | MATARAM  | PADANG       | Rp90.600.000       | Rp4.867.000 |
| 247. | MATARAM  | PALEMBANG    | Rp7.551.000        | Rp4.246.000 |
| 248. | MATARAM  | PEKANBARU    | Rp9.102.000        | Rp4.909.000 |
| 249. | MATARAM  | PONTIANAK    | Rp8.001.000        | Rp4.706.000 |
| 250. | MATARAM  | SURABAYA     | Rp3.829.000        | Rp2.321.000 |
| 251. | MEDAN    | BANDA ACEH   | Rp3.466.000        | Rp2.193.000 |



| NO.  | KOTA           |             | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|----------------|-------------|--------------------|-------------|
|      | ASAL           | TUJUAN      | BISNIS             | EKONOMI     |
| 1    | 2              | 3           | 4                  | 5           |
| 252. | MEDAN          | MAKASSAR    | Rp12.514.000       | Rp6.172.000 |
| 253. | MEDAN          | PONTIANAK   | Rp9.733.000        | Rp5.230.000 |
| 254. | MEDAN          | SEMARANG    | Rp9.284.000        | Rp4.696.000 |
| 255. | MEDAN          | SOLO        | Rp9.284.000        | Rp4.835.000 |
| 256. | MEDAN          | SURABAYA    | Rp10.739.000       | Rp5.134.000 |
| 257. | MEDAN          | TIMIKA      | Rp18.258.000       | Rp9.455.000 |
| 258. | PADANG         | MAKASSAR    | Rp10.974.000       | Rp5.402.000 |
| 259. | PADANG         | PONTIANAK   | Rp8.193.000        | Rp4.460.000 |
| 260. | PADANG         | SEMARANG    | Rp7.744.000        | Rp3.925.000 |
| 261. | PADANG         | SOLO        | Rp7.744.000        | Rp4.065.000 |
| 262. | PADANG         | SURABAYA    | Rp9.199.000        | Rp4.364.000 |
| 263. | PADANG         | TIMIKA      | Rp16.718.000       | Rp8.685.000 |
| 264. | PALANGKARAYA   | BANDA ACEH  | Rp10.546.000       | Rp6.022.000 |
| 265. | PALANGKARAYA   | BATAM       | Rp8.161.000        | Rp4.578.000 |
| 266. | PALANGKARAYA   | YOGYAKARTA  | Rp7.477.000        | Rp4.022.000 |
| 267. | PALANGKARAYA   | MATARAM     | Rp8.557.000        | Rp4.888.000 |
| 268. | PALANGKARAYA   | MEDAN       | Rp10.300.000       | Rp5.412.000 |
| 269. | PALANGKARAYA   | PADANG      | Rp8.760.000        | Rp4.642.000 |
| 270. | PALANGKARAYA   | PALEMBANG   | Rp7.252.000        | Rp4.022.000 |
| 271. | PALANGKARAYA   | PEKANBARU   | Rp8.803.000        | Rp4.696.000 |
| 272. | PALANGKARAYA   | SEMARANG    | Rp7.252.000        | Rp3.947.000 |
| 273. | PALANGKARAYA   | SOLO        | Rp7.252.000        | Rp4.086.000 |
| 274. | PALANGKARAYA   | SURABAYA    | Rp8.696.000        | Rp4.385.000 |
| 275. | PALEMBANG      | BALIKPAPAN  | Rp9.894.000        | Rp5.220.000 |
| 276. | PALEMBANG      | MAKASSAR    | Rp9.466.000        | Rp4.781.000 |
| 277. | PALEMBANG      | PONTIANAK   | Rp6.685.000        | Rp3.840.000 |
| 278. | PALEMBANG      | SEMARANG    | Rp6.236.000        | Rp3.305.000 |
| 279. | PALEMBANG      | SOLO        | Rp6.236.000        | Rp3.444.000 |
| 280. | PALEMBANG      | SURABAYA    | Rp7.690.000        | Rp3.744.000 |
| 281. | PALEMBANG      | TIMIKA      | Rp15.210.000       | Rp8.076.000 |
| 282. | PALU           | MAKASSAR    | Rp4.268.000        | Rp2.578.000 |
| 283. | PALU           | POSO        | Rp1.957.000        | Rp1.423.000 |
| 284. | PALU           | SORONG      | Rp6.878.000        | Rp3.883.000 |
| 285. | PALU           | SURABAYA    | Rp6.878.000        | Rp3.883.000 |
| 286. | PALU           | TOLI-TOLI   | Rp2.941.000        | Rp1.915.000 |
| 287. | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN  | Rp9.038.000        | Rp4.631.000 |
| 288. | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN | Rp7.091.000        | Rp3.915.000 |
| 289. | PANGKAL PINANG | BATAM       | Rp6.739.000        | Rp3.818.000 |
| 290. | PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA  | Rp6.065.000        | Rp3.262.000 |
| 291. | PANGKAL PINANG | MAKASSAR    | Rp9.060.000        | Rp4.663.000 |
| 292. | PANGKAL PINANG | MANADO      | Rp12.097.000       | Rp5.808.000 |
| 293. | PANGKAL PINANG | MEDAN       | Rp8.888.000        | Rp4.653.000 |



| NO.  | KOTA            |           | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|-----------------|-----------|--------------------|-------------|
|      | ASAL            | TUJUAN    | BISNIS             | EKONOMI     |
| 1    | 2               | 3         | 4                  | 5           |
| 294. | PANGKAL PINANG  | PADANG    | Rp7.337.000        | Rp3.883.000 |
| 295. | PANGKAL PINANG  | PALEMBANG | Rp5.829.000        | Rp3.262.000 |
| 296. | PANG KAL PINANG | PEKANBARU | Rp7.391.000        | Rp3.936.000 |
| 297. | PANGKAL PINANG  | PONTIANAK | Rp6.279.000        | Rp3.733.000 |
| 298. | PANGKAL PINANG  | SEMARANG  | Rp5.829.000        | Rp3.187.000 |
| 299. | PANGKAL PINANG  | SOLO      | Rp5.829.000        | Rp3.326.000 |
| 300. | PANGKAL PINANG  | SURABAYA  | Rp7.284.000        | Rp3.626.000 |
| 301. | PEKANBARU       | PONTIANAK | Rp8.247.000        | Rp4.514.000 |
| 302. | PEKANBARU       | SEMARANG  | Rp7.797.000        | Rp3.979.000 |
| 303. | PEKANBARU       | SOLO      | Rp7.797.000        | Rp4.118.000 |
| 304. | PEKANBARU       | SURABAYA  | Rp9.241.000        | Rp4.407.000 |
| 305. | PEKANBARU       | TIMIKA    | Rp16.771.000       | Rp8.739.000 |
| 306. | PONTIANAK       | MAKASSAR  | Rp9.915.000        | Rp5.241.000 |
| 307. | PONTIANAK       | SEMARANG  | Rp6.685.000        | Rp3.765.000 |
| 308. | PONTIANAK       | SOLO      | Rp6.685.000        | Rp3.904.000 |
| 309. | PONTIANAK       | SURABAYA  | Rp8.140.000        | Rp4.204.000 |
| 310. | PONTIANAK       | TIMIKA    | Rp15.659.000       | Rp8.535.000 |
| 311. | SEMARANG        | MAKASSAR  | Rp9.466.000        | Rp4.706.000 |
| 312. | SOLO            | MAKASSAR  | Rp9.466.000        | Rp4.845.000 |
| 313. | SURABAYA        | DENPASAR  | Rp3.198.000        | Rp1.979.000 |
| 314. | SURABAYA        | JAYAPURA  | Rp12.675.000       | Rp7.231.000 |
| 315. | SURABAYA        | MAKASSAR  | Rp5.936.000        | Rp3.433.000 |
| 316. | SURABAYA        | TIMIKA    | Rp11.295.000       | Rp6.589.000 |



PENJELASAN

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer, AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

2. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten Bener Meriah Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam Kabupaten Bener Meriah merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah Kabupaten Bener Meriah PP yang kurang dari 8 (delapan) jam yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam Kabupaten Bener Meriah tidak dapat diberikan kepada Pejabat Daerah/Pegawai Aparatur Sipil Negara/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam komplek perkantoran yang sama.

Catatan:

1. Untuk kegiatan dalam kabupaten yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten.

3. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

4. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan



Pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

5. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

6. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, *Workshop* dan kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan baik di dalam Kabupaten Bener Meriah maupun di luar Kabupaten Bener Meriah yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Catatan:

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

7. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

7.1. Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Pengadaan bahan makanan untuk pasien rumah sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.

b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

7.2. Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan bahan makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat



melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana)

Catatan:

Khusus untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *Rescue Team*.

8. Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Harian

Satuan biaya konsumsi rapat dan harian merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan, dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. biaya makan/minum/*snack* digunakan untuk satuan belanja makan, minum dan *snack* bagi PNS, Non PNS dan umum dalam pelaksanaan kegiatan.

9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

10. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

11. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang



digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

12. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

13. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

14. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke



kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

15. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan/asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun keberangkatan atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri pada Peraturan ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh perhitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Medan ke Jakarta, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Medan ke Bandara Kualanamu; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

b. Kembali

- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu ke tempat



kedudukan (Medan).

16. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran)

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

 BUPATI BENER MERIAH, 

 SATRIKAWI